



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
DAN FIQH PERKAWINAN**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



OLEH:

AFERIADI AMIDIARTA
NIM. 21790215654

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

Aferiadi Amidiarta
21790215654
M. HI. (Magister Hukum Islam)
Maqashid Al-syari'ah Syarat Poligami Undang-Undang No 1
Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan.

Tim Penguji

Dr. Abu Anuar, M. Pd
Ketua

Dr. Yanti, M. Ag
Sekretaris

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
Penguji I

Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA
Penguji II

Tanggal Ujian/Pengesahan

26 September 2019



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku penguji tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **“MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQH PERKAWINAN”** yang di tulis oleh :

Nama : Aferiadi Amidiarta
Nim : 21790215654
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 September 2019.

Penguji I

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
NIP.195402121981031007

Tgl : 21 Oktober 2019

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA.
NIP.197702272003121002

Tgl : 21 Oktober 2019

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan"** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Aferiadi Amidiarta
NIM : 21790215654
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 September 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. H. SUDIRMAN. M, MA
NIP. 1953051819800031002

.....
Tgl:15 Oktober 2019

Pembimbing II

Dr. HEIMI BASRI, Lc., MA
NIP. 197407042006041003

.....
Tgl: 15 Oktober 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Dr. JUNAEDI LUBIS M.Ag
NIP. 196708221998031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Aferiadi Amidiarta
NIM : 21790215654
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 5 Agustus 2019
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. SUDIRMAN, M. MA
NIP. 1953051819800031002

Tanggal: 26 Agustus 2019
Pembimbing II,

Dr. HELMI BASRI, Lc., MA
NIP. 197407042006041003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Dr. JUNAID LUBIS M. Ag
NIP. 196708221998031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. SUDIRMAN. M, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hai : Tesis Saudara
Aferiadi Amidiarta

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Aferiadi Amidiarta
Nim : 21790215654
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1
Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Agustus 2019
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. SUDIRMAN. M, MA
NIP. 1953051819800031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. HELMI BASRI, Lc.,MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Aferiadi Amidiarta

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Aferiadi Amidiarta
Nim : 21790215654
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1
Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Agustus 2019
Pembimbing II

Dr. HELMI BASRI, Lc.,MA
NIP. 197407042006041003

SURAT PERNYATAAN

Nama : Aferiadi Amidiarta

NIM : 21790215654

Tempat/tanggal lahir : Ujung Banjar 17 Maret 1994

Program studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul ***“Maqashid al-Syari’ah Syarat Poligami Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar megister pada program pascasarjana uin sultan syarif kasim riauf, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 9 September 2019



AFERIADI AMIDIARTA
21790215654



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tesis dengan judul “*Maqashid al-Syari’ah* Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqih Perkawinan”, ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar megister Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga *Ahwal al-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda M. Amin dan Ibunda tersayang Martalena yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepadsa penulis. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akmal Mujahidin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Afrizal M., MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. H, Iskandar Arnel MA Ph.D selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman. M, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Helmi Basri, Lc.,MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Sang motivator Meilan Fitriyani, Feri Irawan, Rusmanto MPd, Edi, dan Adi Purwanto.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 5 September 2019

Aferiadi Amidiarta
NIM: 21790215654



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIBING I	
NOTA DINAS PEMBIBING II	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	11
E. Penegasan Istilah.....	12
F. Kerangka Teori.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	61
BAB II UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM	
TENTANG POLIGAMI	
A. UU No 1 Tahun 1974	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Poligami Dalam Hukum Islam	88
-------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Penelitian.....	122
B. Jenis Penelitian.....	122
C. Sumber Data.....	125
D. Teknik Analisa Data	125
E. Teknik Penulisan.....	126

BAB IV MAQASHID AL-SYARI'AH POLIGAMI DAN UU NO 1 TAHUN 1974

A. <i>Maqashid Syari'ah</i> Poligami.....	127
B. Perbandingan Syarat Poligami Pada Fiqih Perkawinan dan UU.....	131
C. <i>Maqashid Syari'ah</i> UU No 1 Tahun 1974 Syarat Kumulatif dalam poligami.....	143

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|----------|---|
| 1. Swt. | = <i>Subhānahu wa ta'āla</i> |
| 2. Saw | = <i>Shallallāhu 'alayhi wa sallama</i> |
| 3. ra. | = <i>Radhiyallāhu 'anhu</i> |
| 4. t.th. | = tanpa tahun |
| 5. t.t. | = tanpa tahun |
| 6. t.p | = tanpa penerbit |

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		tidak dilambangkan
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Ts	te dengan es
5	ج	J	Je
6	ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	Kh	ka dengan ha
8	د	D	De
9	ذ	Dz	de dengan zet
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zet
12	س	s	Es
13	ش	Sy	es dengan ye
14	ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
15	ض	<u>D</u>	d dengan garis bawah
16	ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah
17	ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
18	ع	,	koma terbalik di atas hadap kanan
19	غ	Gh	ge dengan ha
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Ki
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em
25	ن	N	En
26	و	W	We
27	ه	H	Ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	Y	Ye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	إِ	I	<i>Kasrah</i>
3	أُ	U	<i>Dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	أَي	Ai	a dengan i
2	أُو	Au	a dengan u

Contoh:

كُتِبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	أَإِ	Â	a dengan topi di atas
2	إِي	Î	i dengan topi di atas
3	أُو	Û	u dengan topi di atas

Contoh:

قَالَ : *qâla*

رَمَى : *ramâ*

3. Ta marbûṭah

Ta marbûṭah ini diatur dalam tiga katagori:

a. huruf *ta marbûṭah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi *mahkamah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- jika huruf *ta marbûṭah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madīnah al-munawarah*.
- Jika huruf *ta marbûṭah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

4. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّل : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbanâ*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*)

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُونَ : *ta'khudzuna*

التَّوَاء : *an-nau'*

اَكَل : *akala*

اِنَّ : *inna*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farabi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين	: al-Khulafa al-Rasyidin
صلة الرحم	: silat al-Rahm
الكتب الستة	: al-Kutub al-Sittah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aferiadi Amidiarta (2019): Syarat Kumulatif Poligami Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam hukum Islam syarat poligami adalah mampu dan adil dalam nafkah. Dalam UU No 1 Tahun 1974 poligami memiliki dua syarat yaitu syarat alternatif dan Syarat kumulatif, sebagian dari dua syarat ini tidak sama atau tidak dijumpai dalam fiqh maka ini menjadi masalah dalam kalangan masyarakat sehingga mereka ada yang setuju dengan Undang-Undang dan ada yang tidak setuju dengan Undang-Undang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap maqasid syariah poligami dan juga maqasid syariah dalam syarat yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : *Pertama* ,Primer Kitab-kitab UU Perkawinan, KHI, Jasser Auda Maqasid Syariah, Yusuf Qordowi Fiqih Maqasid Syariah, *Kedua*, Sekunder sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis. Teknik analisis data menggunakan teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi penjelasan, maksud dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5. Hasil dari penelitian ini adalah : maqasid Syariah dalam syarat kumulatif dalam undang-undang sangat banyak diantaranya *maqashi al-Syari'ah Hajjiyat* yaitu negara menginginkan warga negara Indonesia terhindar dari perceraian kesulitan dalam hubungan rumah tangga, terjaminnya anak-anak dan istri dalam masalah nafkah oleh suami dan keterbukaan yang dilakukan suami sehingga mendapatkan izin dari isrti, pengadilan memeriksa syarat alternatif dan kumulatif di izinkan oleh negara melakukan poligami. lahirnya undang-undang juga untuk adanya kepastian hukum dalam masalah poligami, sehingga melindungi anak-anak dan istri-isrti dalam poligami.

Kata kunci : *Maqashid al-Syari'ah*, Poligami Undang-Undang, Fiqih Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Aferiadi Amidiarta (2019): Maqashid al-Shari'ah of Polygamy Requirements in Law No 1 of 1974 and Marriage Fiqh

In Islamic law, the polygamy requirements are able and fair in living. In Law No. 1 of 1974 polygamy has two requirements namely alternative conditions and cumulative conditions. Some of these two conditions are not the same or not found in fiqh, then this is a problem in the community so that there are agree and disagree with Law. The purpose of this study is to uncover maqashid sharia of polygamy and maqashid sharia on requirements contained in Law No. 1 of 1974. In the research method, the type of research used is library research. The data sources used in this study are as follows: First, primary data, Marriage Law Books, KHI, Jasser Auda Maqasid Sharia, Yusuf Qordowi Fiqh of Maqashid Sharia. Second, secondary data in this study are books, articles, theses, dissertation and others relating to the problem that the author wrote. Data analysis techniques are using content analysis techniques (content analysis). This analysis technique begins by compiling a variety of related documents to identify explanations, the intent of Law No. 1 of 1974 Section 5. The results of this study are: Maqashid Sharia in cumulative conditions in Law such Maqashi al-Syari'ah Hajjiyat, namely state wants Indonesian citizens to avoid divorce difficulties in domestic relations, guaranteeing children and wives in matters of livelihood by their husbands and openness by their husbands so that they get permission from the wife, the court checks alternative and cumulative conditions permitted by the state to conduct polygamy. The birth of Law is also for the existence of legal certainty in the issue of polygamy, thus protecting children and wives in polygamy.

Keywords: Maqashid al-Shari'ah, Polygamy Law, Marriage Fiqh



الملخص

أفيريادي أميديارتا (2019): المقاصد الشرعية من شروط التعدد في قانون رقم 1 سنة 1974 وفقه المناكحة

أن شروط التعدد في الشريعة الإسلامية هو الاستطاعة والعدل في النفقة. وأما في قانون رقم 1 سنة 1974، في التعدد شرطان وهما شروط اختيارية وشروط تراكمية. هذان الشرطان مختلفان بشروط التعدد التي شرعها الإسلام ولم يجدا في الفقه الإسلامي. وهذا صار مشكلة عند المجتمع لأن منهم من يتفق بهذا القانون ومنهم من لم يتفق.

الغرض من هذا البحث لمعرفة المقاصد الشرعية من التعدد ومقاصده في قانون رقم 1 سنة 1974. هذا البحث بحث مكتبي. تؤخذ المعلومات من المصدرين: أولاً: المصدر الرئيسي وهو من كتاب قانون المناكحة، مجموعة الأحكام الإسلامية، المقاصد الشرعية لجاسر عودة، وفقه المقاصد الشرعية ليووسف القرضاوي. ثانياً: المصدر الثانوي وهو الكتب والبحوث والرسائل العلمية المتعلقة بالتعدد. وأما المنهج الذي سار إليه الباحث هو المنهج التحليلي. والخطوة الأولى في المنهج التحليلي هي جمع المعلومات المتعلقة بالبحث ثم تحليل المقاصد من قانون رقم 1 سنة 1974.

ومن نتيجة البحث يعرف أن المقاصد الشرعية من شروط تراكمية في التعدد كثيرة جداً منها المقاصد الشرعية الحاجية وهي أن الحكومة تمنع الأسرة من الطلاق وتضمن الزوجات والأولاد في النفقة والصدق بعضهم بعضاً لأن الزوجة تستأذن زوجها للتعدد. والحكومة تفتش شروط اختيارية وشروط تراكمية في التعدد. وتشريع هذا القانون يفيد تحقق حكم التعدد وتضمنين للزوجات والأولاد.

الكلمة المرشدة: المقاصد الشرعية، التعدد، القانون، فقه المناكحة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami diartikan adalah, melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang isteri.¹ Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.³

Kemudian dalam Islam juga memaknai poligami seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i adalah menikahi perempuan-perempuan lebih dari satu sampai batasan empat orang sesuai dengan Firman Allah SWT,⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

¹ Sofwer, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA* (KBBI).

² Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007), h. 15.

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 351.

⁴ Ibnu Katsiir, *LubabutTafsir Ibnu Katsiir*, Alih Bahas, Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid II, h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu juga wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam UU poligami itu bisa dilakukan oleh seorang suami apabila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya, isteri terdapat penyakit cacat badan tidak bisa disembuhkan dan isteri tidak bisa melahirkan keturunan.⁶

Pada pasal lima suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan yang juga memiliki syarat kumulatif adalah :

1. Adanya persetujuan isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-Keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁷

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa :

1. Adanya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi (Ps.41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan atau tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (J-ART, Bandung, 2005), h.77.

⁶ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, Alika, 2016), cet, Pertama. h.64.

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan :

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Surat keterangan yang dapat diterima pengadilan.

Selanjutnya mengenai perizinan⁸ isteri-isteri pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan harus memanggil isteri yang bersangkutan dan mendengarkannya.⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami proses sejarah yang sangat panjang. Berawal pada tahun 1950 pemerintah membentuk panitia yang diketua oleh Teuku Mohammad Hasan untuk merancang UU yang khusus mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk, UU No 1 Tahun 1974 memiliki sejarah yang sangat panjang, dan banyak penolakan hingga sampai RUU ini disahkan dan menjadi Undang-Undang hukum perdata Islam Indonesia.

Yang diundangkan pada tanggal 02 Januari 1974-Tambahan Lembaran Negara RI 1974 Nomor 1 dan kemudian disusul dengan

⁸ kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti perizinan adalah, pernyataan mengabulkan (tidak melarang atau sebagainya) atau membolehkan untuk melakukannya.

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. Ke-I. h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahirnya peraturan pemerintah 01 April 1975 sehingga praktis UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak 01 oktober 1975.¹⁰

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang Pelaksanaan poligami Atas UUP no 1 tahun 1974 tentang Pelaksanaan beristri lebih dari seorang.¹¹

Pasal 40 : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.¹²

Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan

¹⁰ *Ibid.*39.

¹¹ *Ibid.*,h.81.

¹² *Ibid.*,h.104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.¹³

3. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja atau.
- b. surat keterangan pajak penghasilan atau.
- c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.¹⁴

4. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan ntuk itu.

Selanjutnya dalam Pasal 42 sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹⁵

Pasal 43 menjelaskan : Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.¹⁶

Pasal 44 menjelaskan tentang pegawai pencatatan pernikahan sebagai berikut : Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.¹⁷

Kalau sang istri tidak mau memberikan izin atau persetujuan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*,h.105

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 pp Nomor 9 tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 tahun 1975.¹⁸

Ketentuan hukum mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengingat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP nomor 9 tahun 1974 :

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-

¹⁸ Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2006).h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁹

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persolan yang memungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.²⁰

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah yang dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri.

Dari uraian di atas muncul masalah UU No 1 Tahun 1974 pada syarat kumulatif terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf a, tentang izin istri untuk melakukan poligami tidak ada dalam kajian hukum Islam. tidak terdapat didalam fiqh klasik, maka UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Huruf a, perlu untuk diteliti karna UU ini menyangkut tentang hukum perdata Islam Indonesia.

Di kampung penulis sendiri terjadinya poligami dengan menikah sirih di tahun 2014 sebanyak 5 pasang, suami poligami dengan diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, setelah beberapa lama akhirnya istri dan anak-anak laki-laki itu mengetahui bahwa suami atau ayahnya sudah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpoligami, yang penulis sendiri lihat adalah perpecahan dan perceraian dalam keluarga tersebut, para suami yang berpoligami mengatakan izin istri tidak harus dan tidak menjadi syarat untuk poligami dalam islam.

Sebagaimana juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam masalah nikah *siri* diantaranya :

- a. Ahmad Zahro, menulis dalam bukunya Fiqih Kontemporer ia menyebutkan, alasan mengapa para Ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat dalam praktik poligami cenderung tidak patu kepada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5, dan melakukan nikah *siri* ini disebabkan poligami mesti meminta izin kepada istri pertama, hal ini sangat sulit untuk dilaksanakan, dan sebagian mereka berpendapat UU ini bertentangan dengan Fiqih.²¹
- b. Leli Nurohmah, ia menyebutkan paling banyak adalah kasus nikah *siri* dalam poligami disebabkan susah untuk mendapatkan izin dari istri pertama, Leli Nurohmah menyebutkan bahwa longgarnya kebolehan pernikahan *siri* di masyarakat sangat memudahkan poligami. Menurut dia, di Cenere (Bogor) di dalam satu RT saja bisa terdapat 10 rumah tangga poligami melalui pernikahan *siri*.²²

Dari masalah tersebut penulis tertarik untuk menggali, meneliti dan menganalisa UU No 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 5 yang menjadi syarat kumulatif dalam melakukan poligami dengan menggunakan *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga hasil penelitian ini dapat menjelaskan

²¹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, PT Qaf Media Kreatif, 2016).h.225.

²² Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2013).h.226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat melalui pemahaman Maqashid, dengan berjudul **(Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan)**. Penulis memilih *Maqashid al-Syari'ah* disebabkan Maqashid adalah sebuah metode yang tentunya memberikan solusi dari masalah-masalah baru, yang membutuhkan kajian mendalam baik dari teknisnya, konsepnya, yang status hukumnya tidak dibahas dalam nash.

Disini penulis menyadari perlu kiranya penulis menggali hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia peraturan yang lahir dari pemahaman ulama Nusantara terhadap Nash khususnya masalah poligami, hingga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hal ini memiliki banyak kemaslahatan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah :

- a. Izin istri tidak termasuk untuk syarat poligami dalam hukum islam .
- b. Banyaknya masyarakat masih menganggap UU ini tidak relevan dengan hukum Islam.
- c. Masih banyaknya nikah sirih disebabkan suami tidak meminta izin kepada istri dan tidak mengurus syarat poligami kepengadilan.
- d. Banyaknya kaum wanita kurang setuju dengan poligami.
- e. Belum jelasnya hikmah dari UU No 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan UU No 1 Tahun 1994 maka penulis batasi pembahasan di dalam penelitian ini pada Maqashid asy-Syariah pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 yaitu syarat kumulatif dalam mengajukan perizinan poligami ke pengadilan. Dalam poligami memiliki dua syarat untuk mengajukan permintaan izin pada pengadilan agama yaitu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif .

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

- a. Apa alasan UU No 1 Tahun 1974 membuat syarat kumulatif pada Pasal 5 dalam syarat poligami ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap poligami dan syarat dalam poligami ?
- c. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* dalam poligami UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komperhensip alasan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat pada syarat kumulatif mengajukan poligami kepada pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui, memahami dan menganalisa hukum dan hikmah dalam penetapan UU No 1 Tahun 1974 Pasal.
- c. Memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dalam menggali hasil ijtihad ulama Nusantara dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5.
- d. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5.
 - b. Menjelaskan secara *Maqashid al-Syari'ah* dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5.
 - c. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap hukum Islam.

Untuk memperluas kanzah keilmuan, khususnya dalam merespon problema dalam masarakat.

E. Penegasan Istilah

Supaya judul dari penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulis memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul.

a. *Maqashid al-Syari'ah*

Secara *Lughowy* (bahasa), *maqashid al-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تدر الى الماء* artinya jalan menuju sumber air.²³

Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²⁴

Mu'jam al-Fadz al-Qur'an al-Karim menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata, *شرع, يشع, شريعة* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²⁵

Kesamaan *syari'at* dengan arti jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁶

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *Maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan

²³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hlm. 712

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178-179.

²⁵ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet. ke I, hlm. 13

²⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-thariqah al-mustaqimah.²⁷

Epistemologi *maqashid al-syari'ah*, dapat kita jumpai dalam karya ulama diantaranya :

Ibnu 'Asyur dalam kutipan al-Yubi, menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah,

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتنا بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة²⁸

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, di mana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan hukumnya.

‘Allal al-Fasi juga menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah :

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها²⁹

“Tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.

Lebih lanjut, Satria Efendi menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-

²⁷ Fazlurrahman, Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 180

²⁸ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bil Adillati al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1998), hlm. 34

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁰

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Pandangan ini, didasarkan pada titik tolak suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum pasti mempunyai tujuan.

b. Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Undang-Undang adalah, *pertama*, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebagainya), disahkan oleh perlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara. *Kedua*, hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam).³¹

³⁰ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

³¹ Sofwer, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA* (KBBI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fiqih

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab : *fiqh*, yang secara etimologi, kandungan makna: mengerti atau paham.³² Contohnya: firman Allah SWT pada surah al-Isra'(17):44:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.³³

Dengan demikian, jika seseorang berkata: fakohtu (saya paham), maksudnya :ia mengerti tujuan perkataan seseorang. Akan tetapi, sebagian ulama menjelaskan, mengerti atau paham yang dimaksud dalam kata fiqh (sebagai bagian dari kata ushul fiqh), bukanlah sekedar paham terhadap hal-hal yang dengan mudah dapat dimengerti, melainkan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, orang yang dapat memahami bahwa api itu panas, atau harimau adalah binatang buas, belum dapat disebut sebagai faqih (orang yang paham), seorang faqih adalah orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keahlian untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah fiqh yang sulit.³⁴

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa : Moh.Zuhri dkk,(Semarang, Dina Utama, 2014).h.8.

³³ Departemen Agama RI, *Op,Cit* , h.298.

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*,(Jakarta, Amzah, 2014).h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Poligami

Dalam KBBI dijelaskan makna poligami adalah sistem perkawinan satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan³⁵. Dalam tulisan ini makna poligami sendiri adalah pernikahan yang sah oleh seorang laki-laki terhadap beberapa orang wanita sampai batas empat orang wanita.

e. Pengertian Hukum Islam

Sebenarnya istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, selanjutnya dalam kitab-kitab ulama tidak di jumpai makna hukum Islam. Secara umum nash menggunakan istilah *syariat* yang secara bahasa adalah jalan yang dilalui air terjun, ia juga berarti yang sebenarnya adalah jalan untuk menuju sumber kehidupan manusia, menunjukkan harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Dalam kajian wacana hukum di kalangan ahli hukum Barat di temukan wacana *Islamic Law* yang di Indonesia menjadi hukum Islam.³⁶

Tetapi tidak ditemukan fakta siapakah yang lebih utama memakai istilah hukum Islam, yang jelas para ahli menisbatkan hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *Syariat* atau *hukmu al-Syar'iy*.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

³⁵ Sofwer, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA* (KBBI).

³⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali pres, 2013).h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat; 2) undang-undang, peraturan, disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Muhammad Daud Ali, 1996: 38). Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang merupakan isim mashdar dari fi'il (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286).³⁷

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya

³⁷ Marzuki, *Jurnal Hukum Islam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Mahmud Syaltout, 1966: 9).

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam

Dalam Al-Quran kata Syari’at terdapat dalam ayat sebagai berikut,³⁸

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

³⁸ *Ibid*, h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,(Al-Maidah : 48).³⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir di jelaskan makna ayat ini adalah, pertama menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT, kitab yang menyempurnakan dari semua kitab yang sudah Allah SWT turunkan kepada para nabinya, para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri, menjelaskan makna ayat ini adalah salah satunya Al-Quran sebagai saksi untuk kitab-kitab yang terdahulu, dan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna.⁴⁰

Selanjutnya dalam ayat “untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan jalan yang terang” Al’-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menjelaskan maknanya adalah, **شرعة ومنها جا** yaitu *Syari’at*

³⁹ Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm.116.

⁴⁰ Ibnu Katsiir, *LubabulTafsir Ibnu Katsiir*, Alih Bahas, Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Aisari, Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), Jilid 3, h.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *Manhaj*. Makna *syari'at* adalah sesuatu yang menjadi pemulaan dalam menuju sesuatu, *manhaj* berarti jalan yang jelas lagi mudah.⁴¹

Secara substansial, *syariat* adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan, *syariat* secara istilah berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Abu Hanifah mendefenisikan *syari'at* adalah yaitu *din*, meliputi semua yang di ajakan Rasulullah Saw, memuat semua aspek kehiduppan.⁴²

Firman Allah SWT dalam Al-Quran mengenai kesempurnaan aturan-aturan yang Allah SWT turunkan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

⁴¹ Alaidin Koto, *Op, Cit.*, h.25.

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

Ayat ini turun pada haji Wada' hari 'Arafah ayat ini merupakan wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad Saw.⁴⁴

F. Kerangka Teori

1. *Maqashid al-Syari'ah*

Secara Lughowy (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *fi'il tsulasi* *قصد* , *يقصد* , *قصدًا* , *مقصدا* , *مقاصدا* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-

⁴³ Departemen Agama, *Op, Cit*, h.107

⁴⁴ Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung, Sinar Baru Grasindo, 2013), h.426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dan kekurangan. Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع* artinya jalan menuju sumber air.⁴⁵ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.⁴⁶

Menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *شرع, يشع* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁴⁷

Kesamaan *syari'at* dengan arti jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁴⁸

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *Maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Secara terminologis, dalam

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hlm. 712

⁴⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178-179.

⁴⁷ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet. ke I, hlm. 13

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode-periode awal, *syari'ah* merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-thariqah al-mustaqimah.⁴⁹

Epistemologi *maqashid al-syari'ah*, dapat kita jumpai dalam karya ulama diantaranya :

Ibnu 'Asyur dalam kutipan al-Yubi, menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah,

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتنا بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة⁵⁰

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, di mana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan hukumnya.

‘Allal al-Fasi juga menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah :

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها⁵¹

“Tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.

Lebih lanjut, Satria Efendi menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-

⁴⁹ Fazlurrahman, Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 180

⁵⁰ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqa tuha bil Adillati al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1998), hlm. 34

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁵²

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Pandangan ini, didasarkan pada titik tolak suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum pasti mempunyai tujuan.

2. Sejarah dan Perkembangan *Maqashid al-Syari'ah*

Penggunaan pendekatan melalui *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas

⁵² Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).⁵³

Al-Yubi, membagi sejarah *maqashid al-syari'ah* pada 2 pembahasan. Berikut akan dibahas lebih lanjut.

1.) Sejarah *Maqashid al-Syariah* Sebelum dipisahkan pada Karangan Karangan Ahli Usul *Maqashid al-Syariah* sama dengan ilmu lainnya. Keberadaannya tidak langsung muncul, melainkan berangsur-angsur hingga sampailah pada fase pembukuan, pembuatan sub-sub pembahasan, sampai masa sekarang. *Maqashid al-syar'iyyah* memang sudah ada sebelum berkembangnya pada kalangan ahli usul. Buktinya ada sebahagian kaidah-kaidah *Maqashidiyyah* yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat dan kitab-kitab para ulama. Penjelasan demikian, akan dipaparkan lebih lanjut.

a.) Keberadaan *Maqashid al-syari'ah* seiring dengan datangnya nash-nash syari'ah dari al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana di dalam al-Qur'an firman Allah swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang

⁵³ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(Qs Al-Baqarah : 185).⁵⁴

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(Qs. Al-Maidah : 6).⁵⁵

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs. Al-Ankabut : 45)⁵⁶

- b.) Ulama telah membicarakan tentang qiyas sebelum tersusunnya usul fiqh

Qiyas pondasinya adalah ‘illat dan mengeluarkan illat-illat hukum dan dibangun dengan teori masalah atau tidak masalah, membahas tentang munasabah illat dan metode mencari illat-illat hukum dalam *Maqashid al-tasyri*’.

- c.) Perkataan ulama dalam permasalahan fikih pada setiap zaman
Sebelum *Maqashid* dibahas secara khusus, ulama-ulama fikih tidak

⁵⁴Depertemen Agama RI, *Op, Cit* , h.28.

⁵⁵ *Ibid*.h.108.

⁵⁶ *Ibid*.h. 401.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah mengabaikan dari pembahasan hikmah-hikmah yang mesti dipahami dari penetapan hukum-hukum. Hal demikian diungkapkan juga pembahasannya dalam *Maqashid al-tasyri'* secara khusus yang berhubungan dengan masalah tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dalam kitab-kitab Hanafiyah, di mana mereka sangat responsif terhadap *ra'yi* dari yang lainnya.

2.) Sejarah Maqashid Syari'ah Setelah Pemisahannya dalam Karya Pakar Ushul

Kata *Maqashid* sendiri pertama kali digunakan oleh al-Hakim at-Turmudzi, ulama yang hidup pada abad ke 2 H. Dialah yang menulis kitab *al-Sholatu Wa Maqashiduha*. Kitab ini membahas tentang manfaat-manfaat dari gerakan shalat seperti berdiri, ruku' dan lain lain. Dia juga menulis kitab al-Hajj Wa asraruhu, al-'Illah, *Ilal al- Syari'ah*, *Ilal al-Ubudiah* dan juga kitabnya al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.⁵⁷

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H.) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H.) dengan bukunya Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari'ah. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H.) dan al-Baqilany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, diantaranya *Mas'alah al-Jawab wa al-*

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Dina Utama, (Semarang:Toha Putra, 1994), hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalail wa al Illah dan Tagrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad. Sepeninggal al-Baqilany muncullah Imam al-Haramain al-Juwaini dan imam-imam lainnya yang memisahkan pembahasan Maqashid al-syari'ah secara khusus.

a. Maqashid Menurut Imam al-Haramain

Dalam keterangan Al Yubi bahwa diantara ulama yang mulai memisahkan pada kitab-kitab mereka sebagian kaidah-kaidah *Maqhasid Syari'ah* dan pembagiannya adalah Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau menjelaskannya dalam Kitab al-Burhan beberapa kali akan tetapi difahami secara kontekstual. Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-Haramain alJuwaini adalah ulama pertama yang membahas teori Maqashid al-syari'ah. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya al-Burhan. Dalam bab qiyas, al-Juwaini menjelaskan illal (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori *Maqashid al-Syari'ah*. Bahwasanya dialah yang pertama kali memberikan penjelasan tentang pembagian *Maqashid* (dharuryah, hajiah, dan tahsiniah). Ada lima pembagian illal dan ushul dalam al-Burhan karya al-Juwaini. Pertama, ashl atau dasar perkara primer (amr dharuri) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-qishash perilaku kriminal, alasanya demi menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhoh.⁵⁸

Pembagian al-Juwaini pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.⁵⁹

Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima illal dan ushul di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat sebagaimana kita kenal

⁵⁸ al-Haramain al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, (TT: Tp, 1992) , Juz II Hlm. 602-604

⁵⁹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013) hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui sistematika dari al-Syatibi: dharuriyat (hak primer), hajiyyat (hak skunder) dan tahsiniyat (hak suplementer).

b. Maqashid menurut Imam al-Ghazali (Wafat th 505 H)

Abu Hamid al-Ghazali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghazali dikenal sebagai mujaddid terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah islam tersebut al-Ghazali digelar hujjah al-Islam, sang pembela islam. Teori Maqashid al Syariah al-Ghazali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya syifa al-Ghalil kemudian dilanjutkan pada Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul. Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghazali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Maqashid al-syari'ah harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan. Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (syara') menurut al-Ghazali, harus melindungi lima hal kebutuhan primer manusia: menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁰

⁶⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-ta'lil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, t.th) hlm. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ghazali membagi *Maqasid al-Syari'ah* menjadi dua, Maqashid yang terkait dengan agama (al-din) dan Maqashid yang terkait dengan hal duniawi (alduniyawi). Kewajiban menegakan sholat dalam ayat: sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban qishos dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan khamr (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan duniawi.⁶¹

Kendatipun demikian pembagian *Maqashid al-syariah* antara al-dini dan al-duniyawi masih terjadi persilangan, seperti perintah sholat disatu sisi adalah al-dini, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai al-duniyawi.

Urutan *maqashid al-syari'ah* menurut al-Ghazali dibagi menjadi tiga; pertama, al-dharurat (hak primer); kedua, al-hajat (hak skunder); dan ketiga altazzayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghazali meringkas kelima pembagian Illal dan ushul dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghazali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya.

⁶¹ Muhammad Mustafied, dkk, Op.Cit., hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Maqashid* menurut Imam al-Razi (Wafat tahun 606 H)

Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang ulama ahli fiqh al-Syafi'ie yang sangat produktif, di mana selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 buku. Pemikiran Maqashid al-Syari'ah al-Razi terangkum dalam karya al-Mashul fi Ilm Ushul al-Fiqh. Buku ini sangat penting karena meringkas ketiga buku ushul klasik : al Mu'tamad karya Abu al-Hasan al-Bashri, al-Burhan karya al-Juwaini, dan al-Mustashfa karya al-Ghazali.⁶²

Sebagaimana al-Ghazali, al-Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: pertama, maslahat yang berhubungan dengan dunia; kedua, maslahat yang berhubungan dengan akhirat. Maslahat yang berhubungan dengan dunia dapat dibagi menjadi tiga : al-dharuriyyah (primer), al-hajiyyah (skunder), dan al-tahsiniyyah (suplementer). Adapun maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya seperti pembersihan jiwa dan mendidik akhlak karena itu manfaatnya kembali di akhirat.⁶³

Sumbangsih *maqashid al-syari'ah* al-Razi masih kental dengan warisan al-Ghazali seperti pada pembagian maslahat berikut contoh-contoh yang dikemukakan. Hanya saja pada al-mashalih al-dharuriyyah yang mencakup lima hal primer, yaitu: jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Razi memberi prioritas jiwa daripada agama. Urutan ini tentu tampak berbeda

⁶² Muhammad Yusuf al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah*, (Urdun : Dar al-Nafais, 2000), hlm. 82

⁶³ Fakhr al-Din Al-Razi, *al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1992) Juz

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan gurunya, al-Ghazali, yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Kelima hak primer alGhazali sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Razi juga membagi Tahsiniat kepada dua bagian yaitu segala apa yang bertentangan dengan kaidah yang mu'tabar dan apa yang tidak bertentangan dengan kaidah.

a. *Maqashid* menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H)

Mengkaji *Maqashid syari'ah* tidak boleh melewatkan nama al-Izz Abd alSalam. Sebagai ahli fiqh al-Syafi'ie yang banyak menulis fatwa dan takhrij fiqh, Izzudin yang dijuluki "sultan para ulama" menulis buku penting berjudul *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang merangkum pemikiran tentang *Maqashid alsyari'ah*.⁶⁴

Dalam pengantar *Qawaid al-Ahkam*, Izzudin mengatakan syari'ah yang dibebankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedangkan larangan Allah swt mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui maslahat menurut Izzudin ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal hal yang mencegah kemadharatan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal terpuji, inilah yang di maksud Izzudin pengetahuan yang bertumpu pada rasio. Dapat dinalar dan

⁶⁴ Muhammad Mustafied, dkk, Op.Cit., hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

difahami oleh nalar manusia. Dan jika terjadi benturan antara dua masalah, diupayakan memilih mana di antara dua yang paling minim resiko buruknya.

Meski penjelasan tentang masalah Izzudin di atas tidak mewakili seluruh pemikiran Maqashid al- Syari'ah namun setidaknya dapat diraba bahwa beliau sangat detail mengulas teori Maqashid. Sikapnya tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi ruang kebebasan pada akal, izzudin masih mengikat pemahamannya dengan teks-teks agama atau Nash Syar'i. Sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghazali pada pembagian masalah menjadi, masalah duniawi yang dapat dikenali dan diketahui melalui penalaran akal atau adat, dan masalah ukhrowi yang dapat dikenali atau diketahui melalui ajaran agama.

Selain pembagian yang duniawi dan ukhrowi, ia juga membagi masalah menjadi tiga macam: Al-dharuriyyah, al-hajiyyah, dan al-tahsiniyyah. Hanya saja pembagian tersebut terlihat masih samar dibalik pembagian macam-macam masalah dan mafsadah yang begitu banyak. Lalu pada al-dharuriyyah, Izzudin memasukan aliradh (kehormatan) untuk melengkapi lima masalah primer alGhazali. Jika masalah primer menurut al-Ghazali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tangan Izzudin, masalah primer digemukan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah ulama ushul pertama yang mencantumkan kehormatan (al-iradh) dalam al-mashalih al-dharruriyyah.⁶⁵

3. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid Syariah ditinjau dari cangkupan Para ulama' kontemporer membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitu Maqashid 'amah (*General maqashid*/tujuan-tujuan umum), *maqashid khassah* (*Specific maqashid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqashid juz'iyah* (*Partial Maqashid*/ tujuan-tujuan parsial).⁶⁶

Maqashid 'amah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan contoh dalam Al-Quran.

Pertama, Penyebaran rahmat bagi Alam semesta (Qs. Al-Anbiya 107),

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁶⁷

Kedua, Penegakan keadilan (Qs. An-nahl : 90),

⁶⁵ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Op.Cit., hlm. 55-60

⁶⁶ Jurnal, **Nurhadi** . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari

Maqashid Syariah

⁶⁷ Departemen Agama, Op, Cit. h.258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶⁸

Ketiga, Menghilangkan Kesulitan atau memudahkan (Qs.

Al-Baqarah : 185),

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Maqashid khassah adalah *maslahat* dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam *muamalat*, dan lainnya.

maqashid juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan

⁶⁸ *Ibid*, h.342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya, juga larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha.

Kajian *Maqashid al-Syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya: *Maqashid al-Syari'ah* pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqashid Dharuriyah* (Primer), *Maqashid Hajiyyah* (Sekunder) dan *Maqashid Tahsiniyah* (Tersier). sinergi secara piramida *maqashid al-Syariah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsniyah*.⁶⁹

Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqashid al-dharuriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzual-nafs*), menjaga akal (*hifzual-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzual-mal*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usul al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-ta'lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, t.th) hlm. 159.

⁷⁰ *Ibid*.h.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hampir seluruh ulama klasik dalam menyusun *maqashid al-Shari'ah* digambarkan seperti piramida, diawali dari *maqashid 'amah* sebagai pokoknya kemudian bercabang menjadi *maqashid khasah* dan puncaknya berakhir pada *maqashid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharuriyah*, *hajiyyah* kemudian *tahsiniyah*.⁷¹

Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara Maqashid satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit.

Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqashid al-Syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana Maqashid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan

⁷¹ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Dengan Maqashid al-Syari'ah*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015).h.36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqati'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.⁷²

Konsep *maqashid* agar dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan hukum Islam tidak boleh dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hukum selalu perkembangan sesuai dengan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum pada saat zamanya. Seperti yang di ungkapkan oleh, Ibnu Taimiyah :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة ولاحوال والنيات والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.⁷³

Permasalahan pada masa klasik dianggap tidak urgen bisa jadi saat ini menjadi sangat urgen dan bernilai tinggi, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.

Maslahat dalam *Maqashid al-Syari'ah* terbagi tiga yang bersifat *qa 'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi di

⁷²Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyyah wa 'Ilaluha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 6 Juli 2019 Jam 7 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 5.

⁷³ Djazauli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 20017), Cet-ke, VII, h, 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takwili, atau yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Maslahat yang bersifat *anni* yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjukki oleh dalil *anni* dari syara'. Sedangkan maslahat yang bersifat *wahmiyah* adalah maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnugnkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁷⁴

4. Hubungan antara *Maqashid al-Syari'ah* dengan Beberapa Metode Istibath Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolak ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan

⁷⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta, Rumah fiqih, 2019).h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah *al-mashlahah al-mu'tabarâh*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.⁷⁵

Penggalan maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'liî* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahî* (Metode Analisis Kemaslahatan).⁷⁶

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

⁷⁵ Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqâshid al-Syarî'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyâs Dan Sadd/Fath al-Dharî'ah)", 128

⁷⁶ ²⁵Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah Menurut al-Syâthibî dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", 184. Lihat pula H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode *Ta'lîlî* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalian hukum adalah metode *ta'lîlî*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan '*illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyâs* dan *istihsan*.⁷⁷

1) Qiyâs

Secara etimologi *qiyâs* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian *qiyâs* secara terminology terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama *ushûl*. namun menurut penulis meskipun redaksi yang digunakan berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai maksud yang sama. Diantaranya dikemukakan oleh 'Abdul Karim Zaidân. menurutnya *qiyâs* adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم
لُشْتَرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ⁷⁸

"Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan 'illat dlam kedua kasus hukum tersebut"

⁷⁷ H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", 318

⁷⁸ Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushul al-Fiqh*, 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyâs terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah ‘*ashl, far*’, *hukmul al-ashl*, dan ‘*illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun qiyâs. pembahasan tentang keempat rukun qiyâs tersebut, rukun yang terakhir yakni ‘*illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadûru ma’a ‘illatihî wujûdan wa ‘adaman*.

Pembahasan tentang ‘*illat* perlu dibedakan antara pengertian ‘*illat* dan *hikmât*. *Hikmât* adalah manfaat yang tampak ketika *Syâri’* (Allah) memerintahkan sesuatu atau terhindarnya kerusakan ketika *Syâri’* melarang sesuatu. Sedangkan ‘*illat* adalah sifat lahir yang tetap (*mudlâbit*) yang biasanya *hikmât* terwujud didalamnya.⁷⁹

Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum, ‘*illat* merupakan, tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmât* merupakan, tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.²⁹

Lain halnya menurut al-Syâthibî, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ‘*illat* adalah *hikmât* itu sendiri, dalam

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk *mashlahah* dan *mafsadah*, berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau kebolehan baik keduanya itu *zhâhir* atau tidak, *mundlâbith* atau tidak. Dengan demikian, baginya ‘*illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahah* dan *mafsadah* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmât* tidak berdasarkan ‘*illat* . Kalau dicermati lebih dalam, sebenarnya *hikmât* dengan ‘*illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penetapan hukum. *Hikmât* merupakan sifat yang lahir tetapi tidak *mundlâbith*. *Hikmât* itu baru akan menjadi ‘*illat* setelah dinyatakan *mundlâbith*. Untuk itu maka perlu dicari indikator yang menerangkan bahwa *hikmât* itu dapat dinyatakan *mundlâbith*.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti focus qiyâs adalah terletak pada ‘*illat*. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa qiyâs ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî’ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqâshid al-Syarî’ah* adalah dengan cara menganalisa ‘*illat* perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Maksudnya Pemahaman *Maqâshid al-Syarî’ah* bisa melalui analisis ‘*illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Shari’at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, qiyâs sebagai salah satu metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqâshid al-Syarî'ah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri.

2. Istihsân

Secara etimologi *Istihsân* berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan *Istihsân* secara terminologi banyak para ahli ushûl yang memberikan definisinya. Diantaranya adalah Imam al-Sarakhsi seorang ulama ahli ushûl dari madhhab Hanafi, beliau mendefinisikan *Istihsân* sebagai berikut:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو اقوى منه لدليل يقتضي ذلك وفقا لمصلحة الناس⁸⁰

“*Istihsân adalah meninggalkan qiyâs dan mengamalkan qiyâs lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokannya pada kemaslahatan manusia*”

Sedangkan menurut al-Bazdawi, *Istihsân* adalah sebagai berikut:

هو العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه او هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه⁸¹

“*Istihsân adalah berpaling dari qiyâs ke qiyâs lain yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis qiyâs berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya*”.

Pada hakikatnya *Istihsân* merupakan perpindahan dari qiyâs *jalî* (yang jelas ‘illatnya) kepada qiyâs *khafî* (yang samar ‘illatnya). Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan qiyâs *jalî* yang ‘illatnya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif.

⁸⁰ Al-Sarakhsi, *Ushûl al-Sarakhsi*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid II, Beirut, 1993, hlm.

⁸¹ Abdul Karîm Zaidân, *Op Cit*, hlm. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, menggunakan qiyâs *khafî* walaupun ‘illatnya tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkannya lebih efektif atau mengecualikan dalil *kulli* (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat.⁸²

Contohnya kasus wakaf lahan pertanian. Menurut qiyâs *jali* wakaf tersebut disamakan dengan akad jual beli. Dalam jual beli yang terpenting adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Yang oleh karenanya, hak pengairan dan hak membuat saluran air diatas tanah itu tidak diperoleh. Sebaliknya, menurut qiyâs *khafî* wakaf tersebut disamakan dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah pemindahan hak guna mendapatkan manfaat dari pemilik barang kepada penyewanya. Begitu juga dengan wakaf, yang terpenting adalah bagaimana barang tersebut bisa dimanfaatkan. Lahan pertanian bisa dimanfaatkan, jika mendapatkan pengairan, maka hak pengairan dan hak membuat saluran berdasarkan qiyâs *khafî* tersebut bisa diperoleh.

Jika dianalisis, ternyata *Istihsân* secara metodologis merupakan alternative penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode qiyâs yang pada satu sisi qiyâs tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan qiyâs ini, nantinya akan membawa dampak

⁸² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaiknya tujuan penshari'atan hukum Islam (*maqâshid al-sharî'ah*). Dengan demikian *istih{san* merupakan metode alternative yang menempati posisi sentral qiyâs yang berupaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Sebagaimana yang dinyatakan al-Syathibî bahwa *Istih{sân* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negative dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhâr fî ma'âlât*.

3. Metode *Istishlâhî* (Metode Analisis Kemaslahatan)

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istishlahî* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzarî'ah* maupun *fath al-dzarî'ah*.⁸³

a. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat atau

⁸³ H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi, bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *syâri'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.⁸⁴

Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek *mashlahah* secara langsung. *Mashlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tekstual terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Adalah jenis maslahat yang keberadaanya didukung oleh teks shari'ah (Al-Qur'an maupun Sunnah). Maksudnya teks – melalui bentuk *'illat* – menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai maslahat.

Contohnya adalah fatwa 'Umar bin Khaththâb tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutny peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di-qiyâs-kan³⁸ dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalny sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuai dengan teks Al-Qur'an (Q.S. *al-Nûr*: 4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali

⁸⁴ Muhammad Sa'îd al-Bûthî, *Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Islamiyyah*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka ‘Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Model analogi atau qiyâs seperti ini dianggap termasuk kemaslahatan yang legalitasnya didukung oleh teks. Maksudnya hukuman 80 kali dera bagi peminum minuman keras dianalogikan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang secara tekstual dijelaskan dalam Al-Qur’an.

2) *Mashlahah al-Mulghah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syarî’at. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syarî’at menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.

Contohnya fatwa seorang *faqîh* tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang *faqîh*, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang *faqîh*, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja.

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh sang *faqîh* tersebut, sekilas jika dilihat dari kaca mata manusia memang benar. Namun jika dilihat dari kaca mata teks syari'at, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks Sunnah. Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berurut. Pertama-tama memerdekakan budak, jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.

3) *Mashlahah al-Mursalah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks shari'ah. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks shari'ah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks shari'ah secara rinci.

Contohnya tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *mushaf*. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu bakar tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran Al-Qur'an tetap terjaga, di sebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur di medan pertempuran.

Terkait dengan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini adalah al-Syâfi'i.⁸⁵

Sebagian lagi menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik. Menurutnya mempergunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, namun sesuai dengan tindakan shara' yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau Sunnah yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal. Dan hal ini menunjukkan dalil yang kuat.⁸⁶

⁸⁵ Maslahat yang keberadanya dianggap (*al-Mu'tabarah*), termasuk kategori qiyâs dalam arti luas. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 432.

⁸⁶ Asfari Jaya Bakri, "Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", hlm. 207-208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Namun demikian, Imam Malik tidaklah menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan shari'at (*Maqâshid al-Syarî'ah*). berarti tidak diperbolehkan jika maslahat tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*). Maksudnya maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima.
- 3) Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudaran atau menghilangkan kesulitan.⁸⁷

b. *al-Dzarî'ah*

Secara etimologi *al-dzarî'ah* berarti perantara, sedangkan menurut terminology adalah suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa *mafsadah* atau *mashlahah*, ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami

⁸⁷ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, 427-428. Bandingkan dengan Nashrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, cet. Ke-II, 122-123. Selain ketiga syarat tersebut, ada dua syarat lain, yang harus dipenuhi oleh *mashlahah mursalah*. Pertama kemaslahatan yang menjadi tujuan shari'at hukum harus bersifat hakiki bukan dugaan semata. Kedua kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (*general*) bukan bersifat individu. Lihat juga 'Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, hlm. 242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *al-dzarî'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-dzarî'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath al-dzarî'ah*.⁸⁸

1) *Sadd al-dzarî'ah*.

Pada dasarnya *sadd al-dzarî'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *sadd al-dzarî'ah* ini lebih bersifat preventif.⁸⁹

Secara tegas Abu Zahrah menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *al-dzarî'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurutnya sumber hukum terkait dengan konsep *sadd al-dzarî'ah* terbagi menjadi dua. Pertama *maqâshid* (tujuan) yaitu perkara-perkara yang mengandung *mashlahah* atau *mafsadah*. Kedua *wasâ'il* (perantaraan) yaitu suatu perantara yang membawa kepada *maqâshid*, dimana hukumnya mengikuti hukum

⁸⁸ Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, 244. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *al-Zarî'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 438.

⁸⁹ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, sofwer ,hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari perbuatan yang menjadi saranya, baik berupa halal maupun haram. Jika dilihat dari segi tingkatan hukum, ketetapan hukum terhadap *wasâ'il* jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang berada pada *maqâshid*. terlepas dari tingkatan hukum tersebut, pada dasarnya yang menjadi dasar diterimanya *sadd al-dzarî'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi saranya, baik perbuatan tersebut dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Tegasnya bahwa jika suatu perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlûb*), maka ia menjadi diperintahkan (*mathlûb*). begitu pula sebaliknya, jika sesuatu tersebut mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang, maka ia pun akan dilarang.⁹⁰

Menurut 'Abdul Karîm Zaidân, bahwa perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan, sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-dzarî'ah*. Contohnya minum minuman keras yang akhirnya merusak akal, menuduh berzina

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op Cit*, hlm. 439.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*qadzâf*) yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang, zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah-masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-dzarî'ah*, karena menurut tabi'atnya perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kejelekan, bahaya serta kerusakan.⁹¹

Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang *dikhitbah*, menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. *Kedua*, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, dilarang oleh para ulama, karena *sadd al-dzarî'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang mushrik di hadapan orang mushrik, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau

⁹¹ Abdul Karîm Zaidân, *Op Cit*, hlm. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya. *Ketiga*, perbuatan yang membawa kepada kerusakan, akibat dari perbuatan *mukallaf* itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah *muhallil*, *bay'u al-'ajâl* seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.⁹²

Adapun contoh *sadd al-dzarî'ah* adalah persoalan *hîlah* terhadap kewajiban zakat. Seseorang mempunyai sejumlah harta yang menurut perhitungan (*nishab*) sudah memenuhi kewajiban zakat, namun menurut perhitungan waktu (*hawl*) masih kurang satu bulan, kemudian sebagian hartanya dihibahkan ke anak dan saudaranya, sehingga jumlah harta tersebut kurang dari satu *nishab*. Perbuatan ini disebut *hîlah* (tipu muslihat), akibat perbuatan ini pula, menghindarkan seseorang dari kewajiban zakat.

⁹² Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, hlm. 244-245. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 442-445. Dan Nashrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 162-163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menghibahkan sebagian harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh shara', karena di dalamnya terdapat akad saling tolong menolong. Akan tetapi, karena hibah yang dilakukan tersebut bertujuan agar terhindar dari kewajiban zakat (*hîlah*), maka perbuatan tersebut dilarang. Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunah telah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.⁹³

2) *Fath al-dzarî'ah*.

Pada dasarnya *fath al-dzarî'ah* merupakan usaha mujtahid dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya *sadd al-dzarî'ah* yang merupakan *wasîlah* atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fath al-dzarî'ah* juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fath al-dzarî'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya.

Menurut Imam al-Qarafy bahwa sebagaimana halnya *sadd al-dzarî'ah* yang berintikan larangan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindarkan dari mafsadah (*dar'u al-mafâsid*), maka ada pula *fath al-dzarî'ah* yang berintikan anjuran

⁹³ Haroen, Nasrun, *Op, Cit*, hlm. 161-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik kemanfaatan (*jalbu al-manâfi'*).⁴⁸

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada *al-dzarî'ah*, selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Maksudnya, perbuatan yang membawa ke arah terlaksanannya perbuatan mubah adalah mubah perbuatan yang membawa ke arah perbuatan haram adalah haram begitu juga perbuatan yang membawa ke arah terlaksanannya perbuatan wajib maka hukumnya juga wajib. Contohnya, zina adalah perbuatan haram. Maka melihat aurat yang menyebabkan terjerumusnyanya kedalam perbuatan zina, hukumnya juga haram. Shalat jum'at hukumnya wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib. Semua hal ini masuk kategori *al-dzarî'ah*.⁴⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas bukanlah termasuk kategori *al-dzarî'ah*, akan tetapi oleh jumhur ulama ushûl al-fiqh, masuk kategori *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Maksudnya, jika perbuatan itu menunjukan sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib, dan hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-wâjibah*. Dan apabila perbuatan itu menunjukan sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-hurmah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَالِيَتَمَّ الْوَاجِبُ إِذَا بِهِ فَهْوَ وَاجِبٌ

“suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu hukumnya wajib”,⁹⁴

مَا دَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“sesuatu yang menunjukan terhadap suatu perbuatan yang haram, maka sesuatu itu hukumnya haram”,⁹⁵

Ulama Hanafiyyah, Syâfi’iyyah dan sebagian Mâlikiyyah mengatakan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *muqaddimâh* bukan masuk kategori *al-dzarî’ah*. Sedangkan ulama Mâlikiyyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa perbuatan tersebut masuk kategori *al-dzarî’ah* yang disebut dengan *fath al-dzarî’ah*. Namun semua sepakat bahwa hal tersebut bisa dijadikan dasar penetapan hukum.⁹⁶

Dari pemaparan di atas tampak bahwa *al-dzarî’ah* lebih mengarah kepada upaya-upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah dan semaksimal mungkin berupaya menarik mashlahah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *al-dzarî’ah* berhubungan sangat erat dengan teori *Maqâshid al-Syarî’ah*.

⁹⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. Ke-IV, hlm. 32.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Haroen, Nasrun, *Op Cit*, hlm. 171-172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, Metode Penulisan, jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi kerangka penelitian, membahas hukum poligami dalam Fiqih Perkawinan

Bab III Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan poligami.

Bab IV Berisi tentang pembahasan tentang Analisis terhadap tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 dan dalam fiqih perkawinan.

Bab V Penutup bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

TENTANG POLIGAMI

A. Undang-Undang No 1 Tahun 1974

1. Sejarah Lahir Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami proses sejarah yang sangat panjang. Berawal pada tahun 1750 pemerintah membentuk panitia yang diketua oleh Teuku Mohammad Hasan untuk merancang UU yang khusus mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk yang kemudian rancangan tersebut diselesaikan pada tahun 1952 sekalipun UU ini gagal diajukan ke DPR karena banyaknya keritikan dari berbagai pihak. Berangkat dari kegagalan ini panitia perancang rumusan UU yang saat itu diketua Mr. Porwosutjipto dari Deprtemen Agama kembali menyusun UU perkawinan yang bersifat khusus bagi golongan agama Islam, Katolik, dan lain sebagainya. Pada akhir tahun 1954 perkawinan khusus ini dapat diselesaikan.¹

Pada saat yang sama, tatkala pada tahun 1958 RUU perkawinan umat Islam diajukan ke DPR secara bersamaan muncul RUU perkawinan yang berlaku secara nasional atas uslan Ny. Sumari dan kawan-kawan dan pada akhirnya kedua UU ini tidak dapat diberlakukan dan dikembalikan kepada pemerintah.²

¹ Dr. H. Fadil SJ,& Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*,(Malang, UIN-MALIki PRESS,2013),h.33.

² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegagalan ini tidak menyurutkan pemerintah untuk kembali mengajukan rancangan tentang perkawinan umat Islam pada tahun 1967 walaupun kemudian pada tahun 1968 baik RUU perkawinan umat Islam ataupun RUU yang diajukan pemerintah mengalami nasib yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh penolakan fraksi Katolik yang ada di DPR-GR untuk membahas RUU yang berkaitan dengan agama.

Pada tanggal 31 Juli 1973, rancangan undang-undang perkawinan yang pada akhirnya menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 diajukan oleh Persiden kepada pimpinan DPR dengan surat bernomor R02/P.U/VII/1973 yang sekaligus mencabut UU yang diajukan sebelumnya, yaitu rancangan UU tentang peraturan perkawinan umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat presiden nomor R02/PRESS/5/1967 tanggal 22 Mei 1967 dan RUU tentang ketentuan pokok perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden nomor R 010/P.U/HK/9/1968 tanggal 7 September 1968.³

Sekalipun umat Islam telah lama menginginkan adanya UU yang mengatur tentang perkawinan, pengajuan RUU yang disampaikan oleh pemerintah justru menuai protes yang kuat dari umat Islam. Hal ini disebabkan oleh RUU tentang perkawinan disinyalir berisi tentang paham sekuler dan yang paling ektrim bahwa RUU tersebut dituduh

³ *Ibid*,h.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Sehingga Buya Hamka memfatwakan keharaman untuk mengikuti RUU tersebut.⁴

Terkait dengan jumlah pasal dalam RUU versi pemerintah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam menurut Kamal Hasan setidaknya ada 11 pasal yang bertentangan dengan umat Islam diantaranya : Pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2. Pasal 7 ayat 1, pasal 8 butir c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2 dan lainnya lagi.⁵

Adanya pasal-pasal yang dianggap bertentangan ini pemerintah melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh agama dan mendapati kesepakatan antara fraksi persatuan pembangunan dan fraksi ABRI yang isinya adalah :

1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin 1 maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi ataupun diubah, tegasnya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk serta UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan UU ini akan dihilangkan.
4. Pasal 2 ayat 1 dari RUUP disetujui untuk dirumuskan dengan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1) dan tiap-tiap

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*,h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara (ayat 2).

5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.⁶

Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya RUUP disahkan sebagai UU yang diundangkan pada tanggal 02 Januari 1974-Tambahan Lembaran Negara RI 1974 Nomor 1 dan kemudian disusul dengan lahirnya peraturan pemerintah 01 April 1975 sehingga praktis UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak 01 oktober 1975.⁷

2. Tujuan Pembuatan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974

Menurut Amir Syarifuddin pembaharuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menekankan kepada proses reformasi fiqh yakni perumusan ulang terhadap rumusan-rumusan yang telah dilakukan oleh para mujtahid terdahulu karena telah bergantinya masa sehingga rumusan lama itu sulit untuk diamalkan.⁸

Kaitannya dengan proses reformasi fiqh ke dalam bentuk undang-undang seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dipilah kedalam empat kemungkinan, yaitu pertama, UU sudah sepenuhnya mengikuti fiqh Munakahat bahkan sepertinya sudah mengutip langsung dari Al-Quran seperti contoh, ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa iddah bagi isteri yang

⁶ *Ibid*,h.38.

⁷ *Ibid*.39.

⁸ Fadil SJ&Nor Salam,*Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*,(Malang, UIN-Maliki Press,2013).h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercerai dari suaminya yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Kedua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sama sekali tidak terdapat dalam fiqh *munakahat mazhab* manapun namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fiqh seperti pencatatan perkawinan dan pencegah perkawinan. Kemungkinan ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab namun karena pertimbangan kemaslahatan, ketentuan tersebut dapat diterima semisal tentang batas minimal usia calon pasangan yang akan kawin, ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Keempat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang secara lahiriyah tampak bertentangan dengan ketentuan fiqh *munakahat* dalam berbagai mazhab namun dengan menggunakan reinterpretasi dan pertimbangan kemaslahatan ketentuan tersebut dapat diterima. Ketentuan yang dimaksud misalnya keharusan perceraian dimuka pengadilan, keharusan izin pengadilan dalam poligami dan serta perceraian yang harus didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁹

Dari sini pula kita dapat mengatakan bahwa tujuan dilakukannya reformasi hukum keluarga yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain untuk merespon situasi dan kondisi kekinian, termasuk perbaikan terhadap kedudukan perempuan dan kitab

⁹ *Ibid.*h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh bermazhab Asy-Syafi'i sehingga melahirkan putusan yang berbeda-beda.¹⁰

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang untuk menciptakan unifikasi hukum karena sebagaimana kita ketahui sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Hakim menggunakan 13 berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.¹¹

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam

¹⁰ *Ibdi.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (UI Pres, Jakarta, 1974), hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure*, sed tamen scripta (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).¹²

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.¹³

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeen Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 1988), hlm. 136

¹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2008, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, yakni pihak suami dan pihak istri.¹⁴

Dari uraian diatas penulis membuat kesimpulan alasan ditetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, adalah untuk memberi jawaban kepastian dan kesamaan hukum perdata Islam Indonesia yang bersifat menggali dari kepribadian bangsa Indonesia yang agamis dan memiliki nilai luhur Pancasila, reformasi hukum yang dilakukan kadangkala adalah sesuai dengan mazhab yang empat dan kadangkala hukum yang dibuat melalui hasil ijtihad yang menekankan kepada al-Maslahah. Seperti sejarah lahirnya Undang-Undang ini sangat panjang sampai penolakan dan berkali-kali diajukan dikenalkan kepada rakyat hingga akhirnya Undang-Undang ini disepakati hingga dari RUU menjadi UU tanggal 2 januari 1974.

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Poligami Dalam Prespektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Di Indonesia Undang-Undang perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Pasal 3 Undang-Undang perkawinan menyebutkan : (1) Pada asalnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin poligami bisa diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat Alternatif dan tiga syarat Kumulatif. Syarat Alternatif (pilihan-pilihan) meliputi, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan syarat kumulatif, yaitu : (a) ada persetujuan dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrti dan anak-anak mereka dan (c) ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isyti dan anak-anaknya.¹⁵

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, kemudian mengadopsi lembaga poligami tersebut sebagai bagian dari ketentuan perkawinan yang diakui namun dengan memberikan beberapa ketentuan. Adanya syarat-syarat poligami yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur, KDT, 2013).h.219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan itu, pada dasarnya berangkat dari kemelut dan tarik ulur antara pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang menentang adanya poligami, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi umat Islam di DPR yang mendukung adanya pasal poligami. Pergulatan ini berujung pada di sah kannya Undang-Undang ini pada tanggal 2 Januari 1974.¹⁶

4. Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang

Ketentuan tentang pengaturan poligami di Indonesia yang dijadikan dasar pelaksanaan perkawinan poligami termuat didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI maupun peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangat optimis dan berkeyakinan bahwa prospek poligami itu semakin baik, dan terbuka kemungkinan berpoligami bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang ikhlas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu poligami di dalam hukum perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan pengaturan yang jelas sehingga dapat dilaksanakan bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Beberapa pemikiran yang dapat dikemukakan antara lain : Sejak lahirnya Undang-Undang No.1/1974, menganut azas monogami, tetapi tetap membuka peluang untuk berpoligami bagi laki-laki mempunyai

¹⁶ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2017).h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan-alasan, Pasal 4 ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada Pasal 5 ayat (1). Kemudian selanjutnya kita lihat pada peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, pada Pasal 41 poin (a) alasan-alasan

Yang dikemukakan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 41 poin (b,c) persyaratan poligami sama substansinya pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. walaupun ada penambahan hanya bersifat administrasi. Lalu kemudian lahir PP No. 10 tahun 1983, yang mengkhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983, dimana pada hakekatnya alasan dan persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama saja pada undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 5 Tahun 1975, hanya ditambah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, yang kelihatannya sangat prosedural dan terlalu panjang.

Proses selanjutnya kemudian lahir Instruksi Presiden No.1 /1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No.154/1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No.1 /1991 tanggal 10 Juni 1991. Isi kompilasi tersebut khususnya dalam persoalan poligami , tidak ada hal yang dianggap lebih mempersulit dari pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Kemudian yang menarik diperhatikan adalah salah satu persyaratan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam pasal 59 KHI disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Kemudian dalam pasal 58 ayat (3) bahwa persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Bahwa peraturan poligami sudah dikenal sebelum Islam disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terkebelakang, baik penyembah berhala maupun bukan, seperti pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum poligami telah dikenal pada berbagai bangsa baik sebelum Islam, maupun setelah datangnya Islam. Namun diketahui bahwa poligami sebelum Islam itu tanpa batas, sedangkan poligami dalam Islam ada jumlah atau batasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi.

Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakat yang terkebelakang. Bahkan banyak kalangan berpendapat bahwa poligami berkembang seiring dengan laju perkembangan budaya dan peradaban suatu masyarakat.

Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan dan kemajuan, seiring dengan sedang bergulirnya reformasi, sehingga pada dasarnya akan sangat berpengaruh pada penegakan dan reformasi dibidang hukum, apalagi beberapa waktu yang lalu PP No. 10 Tahun 1983 yang dianggap sangat ketat memberi kesempatan untuk berpoligami sudah diangkat dalam sebuah wacana untuk direformasi atau dihapuskan. Dalam kenyataannya, adakalanya pria beristeri satu, tetapi secara diam-diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain.

Perbuatan itu bukan saja melanggar hukum syari'at, tetapi juga tata krama spiritual. Tak satu pihak pun yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-laki itu, isterinya maupun masyarakatnya. Sebuah hasil penelitian telah menunjukkan bahwa dibeberapa negara atau bangsa di dunia menyebutkan bahwa, bangsa yang menolak poligami mengakibatkan banyaknya anak haram akibat perzinahan. Di Perancis mencapai 30% dari anak yang lahir adalah hasil perzinahan, Munich 40 %, Austriche 50 % dan di Brussel 60 % .¹¹⁶ Pihak lain, Undang-undang Keluarga negara Islam lainnya, seperti Mesir, syria, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marokko, meskipun tidak seketat Tunisia, juga sangat membatasi poligami sebagai bentuk proteksi negara terhadap warganya. sebagian ulama, seperti Mahmud Muhammad Tahta, Abdullahi an-Naâim, berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan pada masa-masa awal Islam. Ayat-ayat Al Quran yang berbicara tentang poligami lebih bernuansa pelanggaran ketimbang pembolehan.

Sesungguhnya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim sudah menerapkan aturan yang ketat dalam poligami. Di Indonesia Undang-Undang perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Pasal 3 Undang-Undang perkawinan menyebutkan : (1) Pada asalnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin poligami bisa diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat Alternatif dan tiga syarat Kumulatif. Syarat Alternatif (pilihan-pilihan) meliputi, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan syarat kumulatif, yaitu : (a) ada persetujuan dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrti dan anak-anak mereka dan (c) ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isyti dan anak-anaknya.¹⁷

Peraturan ini tidak berjalan efektif, mungkin karena tidak ada polisi yang mengawasi suami yang berpoligami. Kebanyakan suami yang berpoligami tidak mampu berlaku adil. Kebanyakan mereka melakukan tanpa izin istri sehingga poligaminya dilakukannya secara sirri, tanpa pencatatan resmi menyebabkan mengapa poligami menjadi pembicaraan publik di Indonesia saat ini, karena pada hakekatnya praktek pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dilaksanakan dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang poligami baik yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun di dalam KHI. Di samping itu praktek pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini cenderung merugikan hak-hak perempuan sebagai isteri yang dikawini secara poligami dengan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demikian pula merugikan hak-hak anak hasil perkawinan poligami tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa asas yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami relatif yang artinya bahwa seorang suami hanya diperbolehkann mempunyai seorang isteri, namun demikian

¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur, KDT, 2013).h.219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila seorang isteri tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri karena suatu penyakit atau suatu halangan yang diluar kehendaknya maka terbuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama bagi yang beragama muslim. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang jumlah isteri yang diperbolehkan dimiliki oleh seorang suami yang berpoligami, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bagi seorang suami untuk dapat berpoligami sebagaimana telah diuraikan di atas.

5. Poligami Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan.¹⁸ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

¹⁸ Abdurrahman, *Kombilasi Hukum Islam Indonesia*, BAB IX tentang Beristri lebih dari satu orang, (Jakarta, Akademik Pressindo, 1992),h.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹⁹

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas merupakan hal yang terpenting dari poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang untuk berpoligami dan pengadilan agama pun tidak akan memberikan izin kepada suami ntuk berpoligami. Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan hukum. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.²⁰

Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dan seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ *Ibid*, h.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2) KHI, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa :

1. Adanya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi (Ps.41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan atau tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan yang dapat diterima pengadilan.

Selanjutnya mengenai perizinan isteri-isteri pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara

²¹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan harus memanggil isteri yang bersangkutan dan mendengarkannya.²²

Selanjutnya Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 (dua) KHI dan Pasal 57 KHI. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari istri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh

²² Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet. Ke-I. h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.²³

Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkompeten untuk itu. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan²⁴:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang Pelaksanaan poligami Atas UUP no 1 tahun 1974 tentang Pelaksanaan beristri lebih dari seorang.²⁵

Pasal 40 : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*,h.81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁶
2. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.²⁷
3. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a.surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja atau.
 - b. surat keterangan pajak penghasilan atau.
 - c.surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan ntuk itu.

Selanjutnya dalam Pasal 42 sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.²⁹
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menjelaskan : Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.³⁰

Pasal 44 menjelaskan tentang pegawai pencatatan pernikahan sebagai berikut : Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*,h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.³¹

Kalau sang istri tidak mau memberikan izin atau persetujuan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 pp Nomor 9 tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dala pasal 43 PP Nomor 9 tahun 1975.³²

5. Sangsi yang Melanggar Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Ketentuan hukum mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengingat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas

³¹ *Ibid.*

³² Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2006).h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikanakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP nomor 9 tahun 1974 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).³³

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persolan yang memungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Nikah

Menurut hukum agama nikah adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Nikah menurut bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”, orang arab mengatakan *Tanaakahatil Asyjaaru* bilamana pohon-pohon bergabung satu sama lainnya.³⁵

Nikah menurut istilah “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi* (persetubuhan) dengan memakai kata nikah. Menurut pendapat yang kuat, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukan makna *wathi*”.³⁶

Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tujuan dari pernikahan dalam surat Ar-Ruum.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, Ahli Bahasa, Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar, Dkk, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 1154.

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁷

a. Nikah Menurut Bahasa

- 1) نکح - ينكح - نكاح , artinya “akad (perjanjian)”.³⁸
- 2) الزوج , artinya “perjodohan”, الوطء , artinya “setubuh”.³⁹
- 3) Imam Taqiyuddin ad-Dimasqi di dalam Kifayat al-Ahyar, mengatakan bahwa nikah menurut bahasa adalah;

النكاح في اللغة الضم والجمع يقال: نكحت الاشجر اذا التف بعضها على بعض.⁴⁰

“Perkawinan menurut arti bahasa adalah berkumpul dan menggabungkan. Dikatakan, “Aku gabungkan pohon ini agar sebagian condong atas yang lainnya”.

b. Nikah Menurut Istilah Fuqaha’

- 1) Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah.⁴¹
- 2) Nikah menurut syara’ ialah lafal akad yang sudah terkenal yang mengandung beberapa rukun dan syarat.”⁴²
- 3) Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau

³⁷ Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm. 324.

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1461.

³⁹ Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafika, 1992), h. 1.

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Huzairi, *Kifayatuk Ahyar* (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 36.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997), h. 7.

⁴² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Huzairi, *Kifayatuk Ahyar*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan wathi', dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.⁴³

- 4) Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nakah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.⁴⁴

c. Nikah Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memberikan definisi yaitu, perkawinan adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁵

⁴³ Wahbah al-Zuhailly, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989), h.29.

⁴⁴ Al-Allamah Muhammadbin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh EmpatMuzhab* (Cet. XIV; Bandung: Hasyimi, 2013), h. 318.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2006), h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat dan Rukun dalam Pernikahan

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Sedangkan rukunnya nikah adalah:

1. Calon mempelai pria, syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas orangnya.
- c. Dapat memberikan persetujuan.
- d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam
- e. menjalani iddah talak raj'i.
- f. Bukan mahram calon istri.

2. Calon mempelai wanita, syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
- f. Tidak sedang ihram haji/umrah.
- g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Bukan mahram calon suami.⁴⁶

3. Wali nikah, syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Dewasa.
- d. Mempunyai hak perwalian.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

4. Saksi nikah, syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qabul.
- c. Dewasa.
- d. Dapat mengerti maksud akad.
- e. Islam.

5. Ijab kabul, syaratnya;

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

⁴⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Antaraijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.⁴⁷

Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁴⁸ Sedangkan syarat perkawinan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6 dan 7 :

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
3. Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
5. Perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 20-21.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴⁹

Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
- f. Melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.
- g. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- h. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.⁵⁰

Karna begitu mulianya pernikahan Syar'iat mengatur adanya rukun dan syarat dalam pernikahan, rukun menurut ulama Hanafiyah adalah hal

⁴⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 6 dan 7

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya, sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan bagian dari esensinya, para ulama bersepakat bahwa, kedua mempelai, wali, saksi, ijab, dan qabul adalah rukun dalam pernikahan, sedangkan syarat dalam pernikahan ialah, diantaranya adalah mahar Para ulama di dalam kitab fiqih menyebutnya *Shadaq* maknanya sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena nikah atau *wathi*.⁵¹

Sebagaimana firman Allah SWT mensyariatkan mahar dalam Al-Quran,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵²

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap wanita yang ingin ia nikahi dengan penuh kerelaan, dan jika istri secara suka rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya maka boleh bagi suaminya untuk memakannya.⁵³

⁵¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Op,Cit*,h.1283.

⁵² Departemen Agama, *Op,Cit*,h.77.

⁵³ Ibnu Katsiir, *LubabutTafsir Ibnu Katsiir*,,Alih Bahas,Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Aisari,Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2004),Jilid 2, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw juga di jelaskan mengenai mahar saidina Ali r.a ketika ingin melamar putri Nabi Muhammad Saw,

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ
بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتِئَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَاعًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ
أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيْمَةٍ عَرَسِي

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Ali bin Husain bahwa Husain bin 'Ali radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa 'Ali Alaihissalam berkata: "Aku memiliki unta yang bagus dari bagianku hasil ghonimah (rampasan perang) yang diberikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari jatah seperlima. Ketika aku hendak menikahi Fathimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam aku menyuruh seorang laki-laki sebagai pembuat emas dari suku Bani Qainuqa agar berkeliling bersamaku. Maka kami datang dengan membawa wewangian dari daun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idzkhir dan aku tukar dengan emas lalu aku gunakan sebagai mahar dalam pesta perkawinanku".⁵⁴

Para ulama Mazhab dalam kitab Bidayatul Mujaahid para ulama menjadikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan, Imam Malik berpendapat Mahar itu minimalnya seperempat dinar emas, seberat tiga dirham perak, atau senilai dengan harga barang tersebut dan Abu Hanifah berpendapat minimal maskawin itu sepuluh dirham.⁵⁵

Dari ayat Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama mengenai mahar adalah suatu benda yang berharga, baik berupa emas, perak yang bisa dimanfaatkan oleh wanita yang menikah dengan seorang laki-laki.

3. Dasar Hukum Nikah

Hukum melakukan perkawinan, tergantung pada keadaan seseorang yang melaksanakannya. Untuk menentukan hukum perkawinan harus dilihat dari duasegi yaitu pertama, kemampuan melaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan, baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Kedua, kesanggupan memelihara diri, yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh dalam perbuatan zina. Dengan memperhatikan dua hal di atas, para ulama membagi hukum nikah menjadi lima yakni; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram sebagai berikut:

⁵⁴ Lidwa pusaka, *sofwer kitab sembilan Imam Hadis*, (BUKHARI - 1947)

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*, Alih Bahasa Beni sarbeni Dkk, (DKI Jakarta, Pustaka Azzam), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 433.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup berumah tangga serta adanya kekhawatiran apabila tidak kawin akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, bagi seorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, maka bagi orang itu melakukan kawin hukumnya adalah wajib.⁵⁶

b. Sunnah (Mustahab)

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Dalam hal ini melakukan perkawinan lebih baik daripada hidup menyendiri. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan.⁵⁷

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga, sehingga apabila ia kawin akan menyusahkan istrinya. Dengan demikian apabila ia

⁵⁶ Wabih Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Cet. ke-1, Jilid, 9, h. 41.

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perkawinan maka hal itu merupakan jembatan baginya untuk berbuat kezaliman, yang oleh Islam perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan kepada siapapun. Oleh karenanya alat atau sarana untuk berbuat zalim harus dilarang juga.

C. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak akan khawatir tersesat dalam perbuatan zina tetapi mempunyai kekhawatiran dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya. Misalnya, pihak istri tergolong orang kaya dan calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.⁵⁸

D. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang punya harta tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata kawin tidak akan merasa khawatir akan mensia-siakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama. Demikianlah lima macam hukum nikah berdasarkan kemampuan sikap batin/kemampuan memelihara diri seseorang terhadap hawa nafsunya. Lima macam bentuk hukum nikah

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebut diatas sudahdisepakati oleh para jumur ulama', hanya Imam Hanafi nikah menjadifardhu apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Orang tersebut yakin akan terjerumus ke dalam zina apabila tidak akan melakukan perkawinan.
- 2) Ia tidak mampu melaksanakan puasa untuk mencegah perbuatan zina.
- 3) Ia tidak akan mampu membeli amanat (budak wanita) sebagai ganti ketidaksanggupinya mengawini perempuan mereka.
- 4) Ia telah mampu membayar mahar dan memberi mahar dengan harta yang halal.⁵⁹

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal1 menegaskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁶⁰

Karna begitu mulianya pernikahan Syar'iat mengatur adanya rukun dan syarat dalam pernikahan, rukun menurut ulama Hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya, sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan bagian dari esensinya, para ulama bersepakat bahwa, kedua mempelai, wali, saksi, ijab, dan qabul adalah rukun dalam pernikahan, sedangkan syarat dalam pernikahan ialah, diantaranya adalah

⁵⁹ Ibid.h.42.

⁶⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar Para ulama di dalam kitab fiqih menyebutnya *Shadaq* maknanya sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena nikah atau *wathi'*.⁶¹

1) Dari Al-Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. An-Nuur : 32).⁶²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁶¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Op, Cit*, h.1283.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (J-ART, Bandung, 2005), h.354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum : 21).⁶³

2) Hadis Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
 إِنَّا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".⁶⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَعْلَاءَ
 الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْىَ فَلَقِيَهُ
 عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ
 جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضُ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
 الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
 عَلْقَمَةَ قَالَ لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَنْىَ إِذَا لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ

⁶³ Ibid, h.406.

⁶⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, terjem, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006). h.403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَ فَقَالَ هَلَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالِ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عَثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala' Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah.⁶⁵

⁶⁵ Sofwer Hadis, *Kutubu Tis'a*, (MUSLIM - 2485).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁶⁶

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.⁶⁷

dalam KBBI poligami diartikan adalah, melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang isteri.⁶⁸

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.⁶⁹

Kemudian dalam Islam juga memaknai poligami seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i adalah menikahi perempuan-perempuan lebih dari satu sampai batasan empat orang sesuai dengan Firman Allah SWT,⁷⁰

⁶⁶ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinanan Hukum Islam* (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007), h. 15.

⁶⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 351.

⁶⁸ Sofwer, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)*.

⁶⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 351.

⁷⁰ Ibnu Katsiir, *LubabutTafsir Ibnu Katsiir*, Alih Bahas, Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Aisari, Bogor, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid II, h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷¹

b. Poligami Menurut Fiqih Islam

Islam datang ketika tradisi poligami telah berkembang di seluruh lapisan umat dan bangsa, tetapi poligami yang ada pada mereka tidak dibatasi dengan aturan dan undang-undang. Mereka boleh menikah wanita sebanyak-banyaknya tanpa batas. Mereka boleh melakukan apa saja terhadap wanita semuanya tanpa ada tanggung jawab moral maupun kemanusiaan sedikit pun. Perbaikan yang pertama kali yang didatangkan oleh Islam adalah membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini hanya empat orang. Perbaikan semacam itu cukup besar nilainya dalam aturan poligami, karena poligami di masa lalu tidak membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini. Bahkan sebagai Nabi ada yang mengawini lebih dari seratus wanita.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (J-ART, Bandung, 2005), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat poligami dalam islam dari pemahaman dua ayat diatas adalah, *pertama*, jumlah istri yaitu hanya boleh berpoligami dengan empat orang wanita saja. *Kedua*, nafkah seorang suami diharuskan untuk memberikan nafkah meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perkakas yang dibutuhkan dan *ketiga*, adil diantara istri-istri yaitu adil dalam memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perilaku terhadap istri-istri.⁷²

Dalam leteratur fiqih tidak dijumpai tentang mengharuskan syarat poligami perizinan dari istri-istri, bahkan semua mazhab sepakat membolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang istri. Suami disyaratkan adil secara materi dan memiliki kesanggupan secara jasmani dan rohani dalam menafkahi istri-istrinya.⁷³

Selain itu, Islam memperketat aturan poligami dengan mempersyaratkan adanya adanya keadilan di bidang materi di antara sesama isteri menurut kemampuan seorang laki-laki. Dalam masalah poligami, para ahli figih telah menyusun sejumlah aturan yang bermoral dan manusiawi, sehingga tidak ada aturan poligami yang sebaik itu.

⁷² Butsainah As-Sayyid Al-Iraqy, *Asrar Az-Zuwaj As-Sa'id*, terjm, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2002).h.204.

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terjm, Afif Muhammad dkk, (Jakarta, Lentera, 2013), cet-28, h.332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat Poligami dalam Islam

Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.⁷⁴

Surah an-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, yang sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Allah swt. Menghalalkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan (berpoligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat isteri. Allah swt. Mewajibkan di pundak mereka keadilan dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan lainnya, bersifat meteri tanpa adanya perbedaan antara isteri yang kaya dengan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan ningrat, atau isteri yang berkasa rendah. Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para isteri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami.⁷⁵

⁷⁴ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 361.

⁷⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010) Cet.ke-1, Jilid, II.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga isterinya tapi tidak bisa memberikan hak bagi (calon) isteri keempat, maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian pula jika ia dapat memenuhi hak kedua isterinya namun tidak sanggup memenuhi hak isteri ketiganya, ataunhanya bisa memenuhi.

hak satu isteri dan tidak akan sanggup memenuhi hak isterinya yang kedua: haram baginya menikah dengan (calon) isteri yang takkan bisa is penuhi hakhaknya. Menurut ulam fiqih seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki dua syarat⁷⁶ :

- 1) kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri.
- 2) harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁵⁸ M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh QS an-Nisa ayat 3, bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam QS an-Nisa ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

⁷⁶ Sayyid Sabiq, Fiqhul Sunnah, terj. Moh. Abidun, dkk., Fiqih Sunnah, h. 351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁷

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh itu, suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.⁷⁸

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudahkan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Mengenai adilterhadap isteri-isteri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hak ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggam Allah swt. Yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang

⁷⁷ Menteri Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (J-ART, Bandung, 2005), h. 88.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan isteri lainnya.⁷⁹

Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil. Dalam kaitan ini, Aisyah r.a. berkata:

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي املك فلا تلمني

فيما تملك ولا املك

Artinya: “Dari Aisyah r.a. berkata: Rasullullah saw. Selalu membagi giliran sesama isterinya dengan adil dan beliau pernah berdoa: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya.” Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi aku tidak menguasai, yaitu hati.”⁸⁰

Dengan demikian adil dalam pengertian yang dibicarakan adalah keadilan dalam hal pembagian giliran yang harus sama antara satu dengan yang lain, kecuali ada persetujuan-persetujuan beberapa pihak secara suku rela. Selanjutnya adil pengertian pemberian nafkah adalah adil dalam pemberian belanja baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam hal pemberian belanja pihak suami harus mempertimbangkan berat ringannya tanggung jawab seorang isteri. Isteri yang mempunyai lebih banyak beban keluarga yang harus memperoleh pemberian nafkah yang lebih besar dibandingkan yang

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kecana, 2010), h. 133

⁸⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Bab fial-Qasmi baina an-Nisa, h. 242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Dengan demikian, maka keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang berimbang. Jika sifatnya mempersamakan saja, maka hal itu juga tidak berlaku adil. Seroang isteri mempunyai tiga orang anak memperoleh belaja dari suaminya dibandingkan dengan isteri lain yang hanya mempunyai satu anak saja. Berdasarkan itu, maka dapat dengan mudah dipahami bahwa konsep poligami memberikan pintu kebolehan bagi kaum laki-laki untuk beristeri lebih dari satu orang sepanjang mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang digariskan oleh syara'.

Dalam Islam syarat dalam poligami adalah adil dalam menafkahi materi, dalam Islam Wajib memberikan nafkah itu ada tiga macam , pertama sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) sebagaimana Firman Allah SWT,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁸¹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ أٰخَرٰى ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آٰتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁸³

⁸¹ Menteri Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (J-ART, Bandung, 2005), h.37.

⁸² *Ibid.* h.559.

⁸³ *Ibid.* h.559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama hanafiyah berpendapat dalam masalah nafkah batin yaitu berhubungan badan bahwa seorang gadis dan janda yang baru dan yang lama memiliki hak yang sama dalam pembagiannya.⁸⁴

Muhammad Shahrur⁸⁵ yang membuat perbedaan dalam syarat melakukan poligami berpendapat bahwa Allah swt. Tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat mengajurkannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang handak berpoligami, yaitu :

- 1) bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim;
- 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁸⁶

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara:

1. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji.

⁸⁴ Wabah Az-Zuhaili, *Op. Cit* ,h.101.

⁸⁵ Penulis memasukan pendapat Muhammad Shahrur disini sebagai perbandingan dari pendapat Ulama mazhab dan ahli mufasssir. Penulis sendiri tidak setuju apabila poligami itu hanya boleh pada janda atau anak yatim ada asalnya poligami boleh pada anak gadis atau yang sudah janda, karna dalam Islam poligami memiliki maksud yang mulia dalam kaitannya berjuang untuk agama Allah SWT, kaum lelaki di tuntutan lebih dengan menjalankan fungsi *qiwamahnya* yaitu kemampuan mental dan kemampuan fisik yang lebih.

⁸⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), h. 428.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalam.
3. Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bias mendidik dan menjaga mereka. Berbicara masalah adil di sini sungguh Allah swt. Sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, di antara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah swt. Memberi ingat kepada manusia itu, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah swt. Memberi ingat kepada manusia mengenai kekhawatir mereka akan menganiaya isteri-isteri mereka.⁸⁷

Sebagaimana firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

⁸⁷ Abdul Nasir Taufiq al-'Atthar, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸⁸

d. Hukum Poligami Dalam Fiqih Perkawinan

Secara historis, Islam bukanlah satu-satunya agama yang mengakui poligami. Karena sejarah membuktikan bahwa poligami sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa. Di antaranya bangsa Ebre dan Arab pada zaman jahiliah juga terdapat pada suku bangsa “salafiyun”, yaitu negara-negara yang sekarang yang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia, Yugoslavia, Jerman dan Inggris, juga dinegara Asia seperti, Jepang, Cina Indian dan Afrika.⁸⁹

Dalam buku *Het Sexueele Vraagstuk*, karya August Forel diuraikan bahwa poligamitelah dijalankan hingga zaman primitif sampai sekarang. Seperti Raja Solmon misalnya mempunyai 700 orang istri, Raja Uganda yang memiliki 7. 000 istri, seperti dikutip *Nadimah Tanjung*.⁹⁰

Kedatangan Islam, dalam tulisan Rahmat Hakim, sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi, kalau diteliti lebih jauh, lahirnya syariat ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang

⁸⁸ Depertemen Agama, *Op, Cit.* h.77

⁸⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000). h.120

⁹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri hanya sampai pada empat orang istri seperti firman Allah SWT,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٢﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa : 3).⁹¹

Dalam fiqih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, karya Aj-Jaziri diuraikan tentang perbedaan status hukum poligami. Pokok poligami, pada dasarnya terletak pada persoalan “adil”. Jika takut menegakkan keadilan, cukup menikah dengan satu orang istri, sebaliknya jika mampu menegakkan “adil” dibolehkan berpoligami.

Dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan dalam ayat diatas ada duakata yang bermakna adli pertama *tuqsitu* diartikan adil lwan kata dali zhalim artinya menyimpang dari kebenaran yang ALLAH SWT tetapkan, dan *ta'dilu* adil dalam segi harta atau materi, hukum poligami adalah al-Ibahah bagi seorang laki-laki menikahi wanita satu sampai empat orang. Kemudian Allah SWT

⁹¹ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (J-ART, Bandung, 2005), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri apabila berpoligami apabila tidak bisa maka cukup satu orang istri saja. Intinya adalah usaha menjauhkan dari sikap zhalim dan tidak adil adalah sebab disyariatkannya pembatasan satu istri saja. Adil dalam poligami adalah adil dalam materi, yaitu adil dalam menggilir, dan sama dalam memberikan nafkah hidup seperti makanan, tempat tinggal dan minuman. Adapun adil yang bersifat maknawi atau adil dalam urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecendrungan hati maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini diluar kemampuan manusia.⁹²

Kitab Rawai'u al-Bayan: Tafsir Ayatil al-Ahkam, karya Ash-Shabuni mengatakan bahwa hukum poligami adalah boleh dan amar dalam ayat an-nisa ayat 3 adalah amr ibahah ini menurut pendapat jumhur Ulama, sementara Ulama Zhahiriyyah berpendapat wajib sesuai dengan zhahir ayat.⁹³

Ali As-Sayis menjelaskan bahwa kata مَثْنَى وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ merupakan hal dari kata Thaaba yang merupakan kalimat hitungan yang menunjukkan jumlah yang disebutkan. Misalnya lafazh مَثْنَى menunjukkan kepada dua, ثُلَّةٌ menunjukkan kepada tiga dan رُبْعٌ menunjukkan kepada empat, sedangkan penafsiran huruf au yang berarti atau yang berupa

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2005) cet, Ke-VIII. h574.

⁹³ Muhammad 'Ali Ash-Shobuni, *Rawai'u al-Bayan*, (Beirut Dar Al-Fikr), Jilid I, h.426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan atau menambah hingga batasan hanya sampai empat orang menurut kesepakatan Ulama.⁹⁴

Mushtafa Al-Maraghi (1969 : 161-162) memberikan alasan yang memungkinkan seorang laki-laki berpoligami adalah sebagai berikut :

- a. Apabila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan seorang anak, hal yang maslahat bagi sang istri dan keduanya (suami istri) untuk menikahi wanita lain apalagi jika suaminya seorang kaya dan terpendang.
- b. Apabila istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haidz) lagi, kemudian seorang suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri dan mampu juga menjamin kebutuhan anak-anak.
- c. Apabila seorang suami memiliki kelainan seksual tinggi dan takut terjerumus pada perzinahan.⁹⁵

3. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah awt. Kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu perempuan dalam satu masa

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, Bandung, 2011).h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila seorang laki-laki takut terjerumus kepada perbuatan zalim (tidak adil) dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri-isterinya, maka haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Bahkan jika seorang laki-laki takut berbuat aniaya dengan ketidakmampuannya memenuhi hak satu orang isteri, diharamkan baginya menikah sampai ia benar-benar siap dan mampu untuk menikah.

- b. Poligami diperbolehkan karena Islam adalah risalah kemanusiaan yang agung, dan setiap muslim bertanggung jawab untuk membangkitkan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia.⁹⁶
- c. Poligami juga bisa sebagai bentuk penghormatan kepada seorang wanita yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, dan ia telah ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan, sementara ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat menafkahinya selain seorang laki-laki sudah beristeri.
- d. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
- e. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lalainnya.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., Figih Sunnah, h. 358.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.⁹⁷

Mengenai hikmah pernikahan Nabi Muhammad saw, ialah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Isteri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.⁹⁸
- b. Untuk Kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessiniah), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan

⁹⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh as-Sunah li an-Nisa*, terj. Firdaus, Fikih Sunnah Wanita (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 563.

⁹⁸ Muhammad Hesein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, (Jakarta, P.T Intamas, 1972), h.339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹⁹

Jelaslah bahwa perkawinan Nabi dengan Sembilan isterinya itu tidaklah terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks. Sebab kalau motifnya demikian, Nabi mengawini gadis-gadis dari kalangan bangsawan dan dari berbagai suku pada masa Nabi masih berusia muda. Tetapi kenyataannya adalah Nabi pada usia 25 tahun kawin dengan Khadijah seorang janda berumur 40 tahun dan pasangan suami isteri ini selama lebih kurang 25 tahun berumah tangga benar-benar sejahtera dan bahagia serta mendapatkan keturunan : dua anak laki-laki, tetapi meninggal masih kecil, dan empat anak wanita. Setelah Khadijah wafat tahun ke 10 sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, barulah kemudian Nabi memikirkan kawin lagi. Mula-mula kawin dengan Saudah binti Zum'ah, seorang janda, kemudian disusul dengan isteri-isterinya yang lain. Tetapi tidak ada seorang isteri pun yang dikawini dengan motif untuk pemuasan nafsu seks atau karena harta kekayaannya, melainkan karena motif agama, politik, sosial dan kemanusiaan.¹⁰⁰

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 136.

¹⁰⁰ Muhammad Hesein Haikal, *Op Cit*, h.330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian penulis ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku (kitab), majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.¹ metode yang digunakan penelitian kualitatif, metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data dan penelitian ilmu sosial.²

B. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.

Penelitian ini berupaya untuk mencari maqasid syariah, tujuan dan hikmah dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1. UU ini merupakan hukum yang sah dijalankan di Indonesia.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004), hal.3.

² Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritis dan praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), hal. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kepustakaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumberdata penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis.

Maka metode untuk mengumpulkan data yang dikehendaki dengan dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab UU perkawinan Indonesia, kitab-kitab penjelasan UU perkawinan Indonesia, kitab-kitab fiqih, artikel dan data yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :

Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini digunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. *Kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.³

³ Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama: Prespektif teoritis dan praktis*, (Jakarta, Badan Litbang Agama 2000), hal.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tinjauan maqasid syariah atau penjelasan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 menggunakan penjelasan melalui pendekatan metode maqasid syariah dan menggali hikmah-hikmah dalam UU tersebut. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini secara umum ada dua sumberdata, yaitu primer dan sekunder.

1. Data Primer

Kitab-kitab UU Perkawinan, KHI, *al-Muwafaqat*, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat* dan *Evolusi Maqosid al-Syari'ah* dari Konsep Pendekatan, Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al-syari'ah*: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi, Membumikan *Syari'at* Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai, Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, dan *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis. Buku : Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, *Nailul Authar*, . *Tafsir Al-Munir*, *Ushul Fiqih*, Metodologi Research dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website :

Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iiyyah wa 'Ilaluha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 6 Juli 2019 Jam 7 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*.

Softwer :

Sofwer, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, dan Lidwa pusaka, *sofwer kitab sembilan Imam Hadis*.

E. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi penjelasan, maksud dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah, semua data terkait dengan UU No 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 5 Ayat 1 dari literatur-literatur yang terkait.

Menggali dari kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan UU No 1 Tahun 1974 dan juga melihat penjabaran metode maqasid dalam masalah pernikahan dan poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari beberapa penjelasan berdasarkan data dan analisis yang telah penulis kemmukakan sebelumnya, pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menetapkan syarat kumulatif pada pasal lima adalah, bertujuan dilakukannya reformasi hukum keluarga yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain untuk merespon situasi dan kondisi kekinian, termasuk perbaikan terhadap kedudukan perempuan dan untuk menciptakan unifikasi hukum karena sebagaimana kita ketahui sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Hakim menggunakan 13 kitab fiqh bermazhab Asy-Syafi'i sehingga melahirkan putusan yang berbeda-beda.
2. Hikmah dan syarat poligami dalam hukum islam adalah, bentuk pernikahan yang didalamnya terdapat maksud-maksud yang mulia dalam kaitannya berjuang untuk beribadah kepada Allah SWT melalui mahligai rumah tangga dan keluarga. Kaum laki-laki dianugerahkan kematangan mental, kemampuan fisik dan materi, sejatinya mengemban peran untuk dapat berbuat lebih dalam rangka menjalankan fungsi *qiwamahnya* dalam kehidupan. Dan syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami dalam hukum islam yaitu adil dalam secara materi dan nafkah.

3. *Maqashid al-Syari'ah* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 khususnya dalam syarat kumulatif pasal 5 ayat 1 huruf a, sebagai berikut :

Maqashid al-Syariah UU No. 1 tahun 1974 tentang poligami memuat tiga substansi yaitu: 1). *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li *hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memlihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan). 2). *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). 3). *Maqashid al-Juziyah*: Keadilanya li *al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid Kulliyah* li *hifzi al-Din* (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparaansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadahdan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dar'ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari tesis ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Dengan penelitian ini penulis berharap kepada yang ingin melakukan poligami patuh terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 5 khususnya pada syarat kumulatif disebabkan memiliki kemaslahatan dan kebaikan untuk menjaga rumah tangga dan jauh dari konflik dan perceraian dan penulis juga tidak mengatakan tidak sah nikah sirih dengan syarat yang ditetapkan hukum Islam karna Undang-Undang juga lahir dari penggalian hukum Islam.
3. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperketat lagi penegakan hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 5 dalam syarat poligami, dan membuat sosialisasi mengenai tujuan Syarat dalam Undang-Undang untuk melakukan poligami. Sehingga permasalahan nikah sirih dan penolakan peraturan ini dalam masyarakat semakin berkurang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdullah, EA. 2017. *Pembaruan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Abdurarahman. 1992. *Kombilasi Hukum Islam Indonesia, BAB IX tentang Beristri lebih dari satu orang*. Jakarta : Akademik Pressindo
- Ahmad, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : Cv Pustaka Setia
- Ahmad, Hadi, Munfaat. 1992. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Duta Grafika.
- Al-Munawwir , Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya:PenerbitPustaka Progressif cet. 14.
- Ali , Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zuhailly, Wahbah. 1989. *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII* . Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Al-‘Atthar, Abdul, Nasir, Taufiq. 1985. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* . Jakarta : Bulan Bintang
- Aminuddin, Slamet, Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat, Jilid I*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Asy-Syaukani , Al-Imam. 2006. *Nailul Authar*,terjm. Jakarta : Pustaka Azzam
- As-Suyuti, Jalaludin. 2013. *Tafsir Jalalain*. Bandung : Sinar Baru Grasindo
- Auda, Jaser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Dengan Maqasid Syariah*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wabah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuh ,Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Jakarta : Gema Insani Cet.ke-1,Jilid,II.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Tafsir Al-Munir,terj:Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Jakarta : Gema Insani cet,Ke-VII



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- AZ-Zuhaili, Wabah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta : Gema Insani Cet.ke-1,Jilid,II
- Dahlan , Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Amzah
- Departemen Agama. 2003. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV. Diponegoro.
- Depertemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung : J-ART
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Bab fial-Qasmi baina an-Nisa
- Djazauli. 2017. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta,Kencana Cet-ke,VII.
- Fazlurrahman. 1984. *Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad*. Bandung : Pustaka
- Ghozali, AR. 2010. *Fiqh Munakahat (Cet. IV*. Jakarta : Kencana.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset
- Jalil, Ahmad. 2012. *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*
- Kharlie, AT. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur : KDT.
- Koto , Alaidin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali pres.
- Mawardi, AI. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari KonsepkePendekatan*. Yogyakarta : Lkis
- Mawardi, AI. 2003. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari KonsepkePendekatan*. Yogyakarta : Lkis
- Mastuhu dkk.2000. *Manajmen Penelitian Agama perspektif teoritas dan praktis*. Jakarta : Badan Litbang Agama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Munawir, Ahmad, Warson. 2002. *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progresif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mughniyah, MJ. 2013. *Fiqih Lima Mazhab*, terjm, Afif Muhammad dkk. Jakarta : Lentera.

Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mustafied, Muhammad dkk. 2013. *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*. Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013)

M. Zein, Satria, Efendi. 2005. *Usul Fiqh*. Jakarta : Kencana.

Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I

Qardhowi , Yusuf. 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*. Bandung : Pustaka Mizan Cet.ke I.

Rafiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Iskam Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada cet.Ke-I.

Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu Cet. I

Rafeldi ,Mediya. 2016. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta : Alika cet,Pertama.

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh as-Sunnah, Juz II* . Bandung : PT. Al-Ma'arif.

Sahrani, S, Tihami. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed.I(Cet.III)*. Jakarta: Rajawali Pers

Salam, Nor,Fadil. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang : UIN-MALIKI PRESS

Syarifudin , Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Edisi Ke I.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syarifuddin , Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Shihab, M.Quraish. 1999. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Shahrur , Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (terj.) Sahiron Syamsudin*. Yonyakarta : el SAQ Press.

Shidarta, DD. 2008. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2008

Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta : UI Pres.

Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Edisi Ke I

Rafeldi, Mediya. 2016. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta : Alike cet,Pertama

Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia.

Tholabi, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Remaja Rosdakarya.

Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Remaja Rosdakarya.

Zahro, Ahmad. 2016. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta : PT Qaf Media Kreative.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Keputusan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

JURNAL :

Marzuki, *Jurnal Hukum Islam*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SOFTWARE :

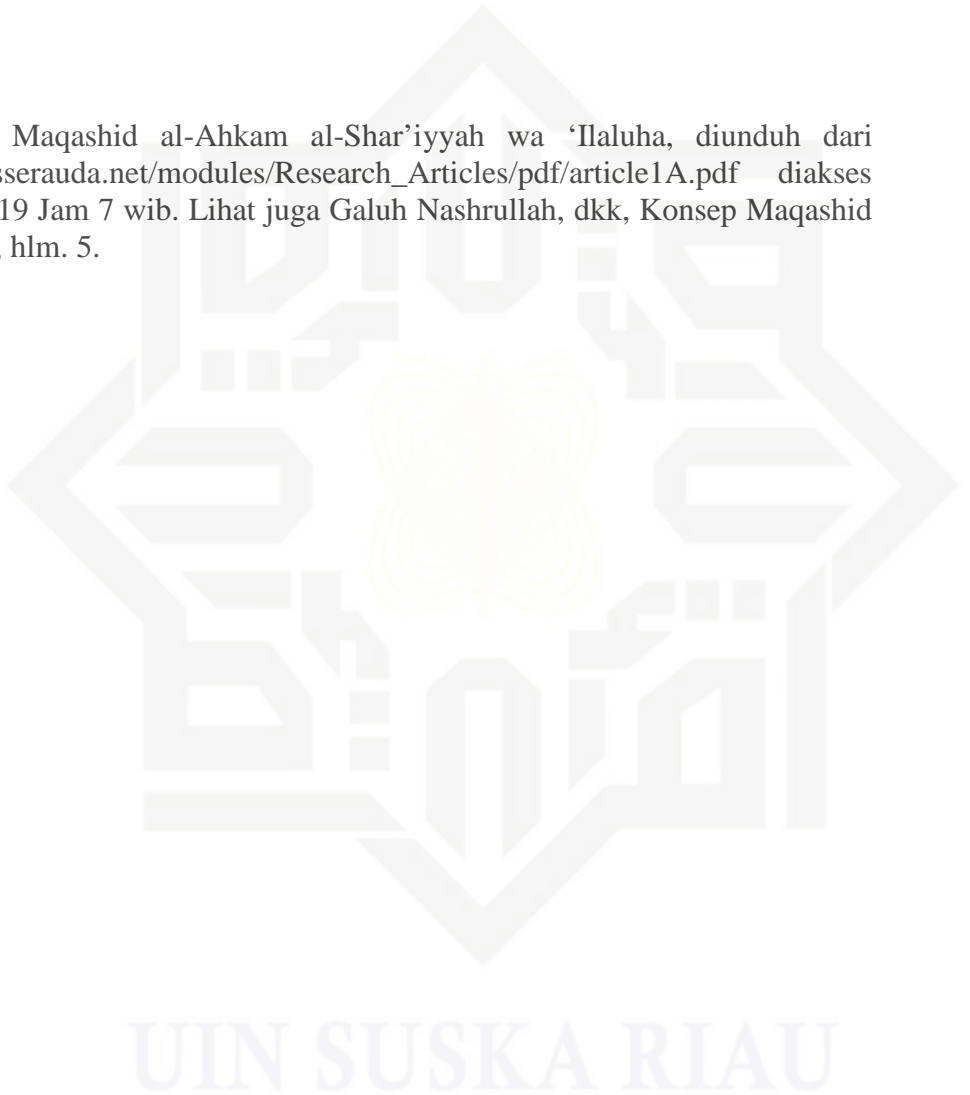
Sofwer, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA* (KBBI).

Lidwa pusaka, *sofwer kitab sembilan Imam Hadis*, (BUKHARI - 1947)

Sofwer Hadis, *Kutubu Tis'a*, (MUSLIM - 2485).

WEBSITE :

Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyyah wa 'Ilalaha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 6 Juli 2019 Jam 7 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 5.





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Aferiadi Amidiarta

Nomor ID : 21790215654

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 17 Maret 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

57 : الاستماع
54 : القواعد
55 : القراءة
553 : النتيجة

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by Undang

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and identification presented in this score report are approved.

Address : Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP 0852 71 44 0823

Email : info@pusat-bahasa.info website: pusat-bahasa.info

2. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari Pusat Bahasa UIN Suska Riau.



M. Ag

M. Ag

The Head of Language Development Center



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Aferiadi Amidiarta

Nomor ID : 21790215654

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 17 Maret 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة القراءة اللغوية

57 : الاستماع
54 : القواعد
55 : القراءة
553 : النتيجة

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved. Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823

Email : info@pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id Website : pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id



Sultan Syarif Kasim Riau

The Head of Language Development Center

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Juli 2019

Nomor : 1757/Un.04/PPs/PP.00.9/2019
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan
Program Pascasarjana UIN Suska Riau
Di
Pekanbaru

Dengan hormat,

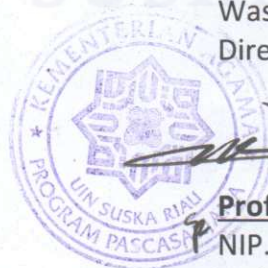
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Aferiadi Amidiarta
NIM	: 21790215654
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: V (Lima)
Judul Tesis	: Maqasid Syariah Tentang Poligami Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fiqih Perkawinan

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Perpustakaan Program Pascasarjana UIN suska Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI PEMBINGUNGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	11/7/19	Jumpa pertama Se bimbingan	/	
2.	10/7/19	Perbantuan Ma Bueis Syarah Gab 19	/	
3.	23/7/19	lana Perbantuan Arafat & Keseluruhan	/	
4.	20/7/19	Perubahan kata tesis luru dibaca	/	
5.	2/8/19	leoreksi keseluruhan	/	
6.	26/8/19	Perbantuan dan Hak cipta milik UIN Suska Riau	/	

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	2/7/19	Jumpa pertama Se bimbingan	/	
2.	9/7/19	Penyarah an Pembantuan Keseluruhan Gab 1-5	/	
3.	24/7/19	Perbantuan Gab 2 & 4	/	
4.	30/7/19	Penyarah an seluruh tesis luru dibaca	/	
5.	1/8/19	leoreksi dan Perbantuan	/	
6.	5/8/19	Arah an & State Islamic University of Sulkan Syarif Kasim Riau	/	

KONTROL KONSULTASI PEMBINGUNGAN TESIS / DISERTASI *

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penyalutkah sumber.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, dan tidak boleh dipublikasikan atau digunakan untuk tujuan komersial.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing II / Co Promotor *

Muhammad Ridwan

Orhelwin Bani



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA

NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

: Afriadi Amidiarta

: Pasca Sarjana

: HK

: Anwa Syahriyah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	Rabu 27/3/2019	Peran mamak dalam memelihara harta warisan pusaka tinggi di kamagarian mamang mamuk aguna menurut hukum Islam		
	Rabu 27/3/2019	Ikhtad Wanita Karir menurut hukum Islam dan maqasid.		
	Rabu 27/3/2019	Penetapan Nasab dan hubungan biologis forensik di hukum Islam		

Pekanbaru, 27 Maret 2018
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

AFERIADI AMIDIARTA, lahir di Dusun Ujung Banjar 17 Maret 1994 tepatnya di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda M Amin dan Ibunda Martalena. Sebelum penulis menyangang nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh sekolah dasar di SDN 004 Desa Merbau tahun 2001-2007, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPN 1 Bunut tahun 2007-2010, dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di pondok Darussalam Gontor jalur intensif dari 2010-2012, setelah itu penulis menyelesaikan sekolah menengah atas di MA Al-Qasimiah Sorek Satu. Dengan bermodal semangat dan dukungan keluarga dan orang-orang tercinta penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim dan pada tanggal 7 april 2017 telah lulus ujian Munakasah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

UIN SUSKA RIAU